



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, Kabupaten Nias Selatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak tujuh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 Januari 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- t. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 19 September 2024;
- u. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Serta *Monitoring* dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- v. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, 22 Juli 2024;
- w. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 Januari 2024;
- x. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/85/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 20 September 2024;
- y. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 November 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Pengukuran Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Dalam terminologi ekonomi, ekonomi makro mencakup perilaku perekonomian secara keseluruhan atau nasional. Cakupannya meliputi kesempatan kerja, harga dan perdagangan internasional. Perilaku perekonomian nasional selama tahun 2024 secara tidak langsung berdampak pada perilaku perekonomian regional atau perekonomian daerah. Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Beberapa indikator ekonomi makro, fiskal/keuangan yang berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2024 antara lain Pertumbuhan Ekonomi (*economic of growth*), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Kenaikan Harga (inflasi), pendapatan per kapita, Tingkat Kesempatan Kerja dan Investasi.

Selama tahun 2024 pelaksanaan aktivitas Pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan berjalan normal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan visi yaitu “*mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur, dan sederhana*”. Beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, pelayanan administrasi pemerintahan, dan kegiatan pemerintahan lainnya yang membebani anggaran belanja daerah, diharapkan memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap kenaikan pendapatan perkapita masyarakat. Kenaikan pendapatan perkapita akan cenderung meningkatkan konsumsi terutama konsumsi primer. Selain itu kondisi perkembangan sosial berjalan normal ditandai dengan stabilitas sosial dan politik yang cukup kondusif dan tingginya tingkat kepercayaan atau dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan.

Disisi lain, tantangan yang dihadapi Pemerintah pada umumnya dan khususnya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang perlu dilakukan cara untuk menghadapinya adalah: (1) upaya meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) mengatasi pengangguran (*unemployment*) atau membuka lapangan pekerjaan; (3) penyadaran akan dampak budaya atau adat istiadat lokal yang berpengaruh pada perekonomian seseorang atau pendapatan perkapita; (4) upaya memotivasi etos kerja tinggi. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah semuanya bertujuan supaya tercipta kehidupan yang cukup dan layak dengan selalu memperhatikan dan mempertahankan sumber daya alam. Selama tahun 2024 kondisi ekonomi makro Kabupaten Nias Selatan adalah :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Nias Selatan terus mengalami pertumbuhan mulai 2020 sebesar 0,61% dan tahun 2021 sebesar 2,02%. Pada Tahun 2022 sampai tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,08% dan 3,65%. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,82%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2020	0,61%
2021	2,02%
2022	3,08%
2023	3,65%
2024	3,82%

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

Distribusi persentase pencapaian pertumbuhan ekonomi Nias Selatan dapat dilihat pada tabel Produk Domestik Regional Bruto berikut ini.

Tabel 2. 2 . Distribusi PDRB Kabupaten Nias Selatan

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,04	1,77	3,30	2,72	2,98
B	Pertambangan dan Penggalian	2,96	4,28	3,29	3,77	4,69
C	Industri Pengolahan	0,04	3,82	1,59	3,15	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	5,91	4,49	3,94	5,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01	1,35	1,35	2,89	2,04
F	Konstruksi	4,46	2,58	2,33	4,66	4,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,22	5,34	5,08	5,23	4,84



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	1,72	1,35	5,22	4,70	4,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,75	6,88	5,47	4,62
J	Informasi dan Komunikasi	3,79	7,49	6,88	5,49	6,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	2,46	1,06	5,42	3,12
L	Real Estate	1,86	0,68	0,70	3,90	4,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,79	2,51	2,78	5,45	1,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,53	0,21	0,12	3,98	5,73
P	Jasa Pendidikan	1,65	3,09	3,64	3,35	2,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,26	0,03	3,78	5,85	6,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,54	2,15	4,78	5,74	4,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		0,61	2,02	3,08	3,65	3,82

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

b. Pendapatan per Kapita

Ukuran pendapatan per kapita diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan sampai dengan Desember tahun 2024 berjumlah 389.957 jiwa.

PDRB per kapita dipengaruhi oleh tingkat inflasi artinya inflasi atau kenaikan harga-harga mengakibatkan daya beli masyarakat (*purchasing power*) semakin menurun, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2. 3. PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Konstan Harga Konstan 2020 – 2024
(dalam miliar rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	ADH Berlaku	ADH Konstan
2020	7.164,27	4.246,83
2021	7.420,63	4.332,63
2022	8.014,50	4,466,09
2023	8.574,98	4.629,30
2024	9.128,45	4.806,33

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

Indeks Implisit dan Laju Implisit PDRB Kabupaten Nias Selatan mencerminkan kenaikan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4. Indeks Implisit dan Laju Implisit PDRD 2020 – 2024
(dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Indeks Implisit	Laju Implisit
2020	168,70	3,78
2021	171,27	1,53
2022	179,45	4,78
2023	185,73	3,22
2024	Proses	2,53

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 sebesar 64,12 dan pada tahun 2024 IPM Kabupaten Nias Selatan mengalami kenaikan sebesar 1,75% sehingga IPM tahun 2024 sebesar 65,87 sedangkan tahun 2023-2024 tumbuh rata-rata di dengan klasifikasi sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebagaimana pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 2. 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Nias Selatan

UHH		EYS		MYS		Pengeluaran per Kapita		IPM	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
68,58	71,77	12,78	12,92	6,48	6,52	7.299	7.730	64,12	65,87

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

d. Angka Pengangguran

Angka pengangguran merupakan keberhasilan dalam menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas pada Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 sebesar 3,03%.

e. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan pada Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020-2021 secara konsisten terus naik, namun pada tahun 2022-2024 angka kemiskinan menurun menjadi 16,32%, persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 6. Persentase Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Persentase Kemiskinan
2020	16,74%
2021	16,92%
2022	16,48%
2023	16,39%
2024	16,32%

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

f. Gini Ratio

Gini Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien *gini ratio* mendekati nol dan sebaliknya pendapatan dikatakan semakin tidak merata ketika koefisien *gini ratio* mendekati satu. *Gini Ratio* pada Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2020 – 2024 pemerataan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

pendapatan Nias Selatan tidak merata, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 7. Gini Ratio Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Gini Ratio
2020	0,287
2021	0,241
2022	0,223
2023	0,241
2024	0,247

Sumber data: BPS Kab. Nias Selatan (Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2025)

2.1. Kebijakan Keuangan

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi, dan pemberian bagi hasil penerimaan serta bantuan keuangan atau dikenal sebagai dana perimbangan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sedangkan disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi :

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang potensial.

Pengaturan pengelolaan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada :

- 1) Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada: (a) potensi dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (b) tidak memberatkan masyarakat; (c) tidak merusak lingkungan; (d) mudah diterapkan dan dilaksanakan; (e) penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten. Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang objektif dan proposional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa;
 - 2) Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundang/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.
- b. Transfer ke Daerah
- Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 1) Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi;

2) Dana Alokasi Umum

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatand daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan antar-Daerah.

4) Insentif Fiskal

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada Daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja Daerah dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Dana Desa

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan diarahkan untuk Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- a. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- c. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - d. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - e. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud;
 3. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
 4. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penetapan belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/350/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besar Nominal Belanja Hibah, Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/805/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/350/2024 Tentang Penetapan Penerima dan Besar Nominal Belanja Hibah di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/361/2024 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kategori Beasiswa Kurang



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Mampu/Miskin dan Kategori Beasiswa Berprestasi di Bidang Akademik Tahun Anggaran 2024, Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/990/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/361/2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kategori Beasiswa Kurang Mampu/Miskin dan Kategori Beasiswa Berprestasi di Bidang Akademik Tahun Anggaran 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal, transparan, partisipatif, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, maka kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk:

- a. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
- b. Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD 2024 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Nias Selatan yaitu *“mewujudkan masyarakat yang maju, sehat, dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur, dan sederhana”*.

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam Perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, terdapat kelebihan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Sedangkan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan dua kali perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan yaitu:

- a. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 Januari 2024;
- b. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10.3.3.2/85/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 20 September 2024;
- c. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, tanggal 15 November 2024.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp1.552.128.805.972,14 atau 99,48% dari target pendapatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.560.183.438.647,37. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.543.327.013.979,97 maka mengalami kenaikan sebesar Rp8.801.791.992,17 atau 0,57%.

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.592.441.517.658,05 atau 92,03% dari target belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.730.280.463.148,00. Apabila dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.436.980.765.349,40 mengalami kenaikan sebesar Rp155.460.752.308,65 atau 10,82%. Dengan demikian dari realisasi pendapatan dan belanja tahun 2024 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar Rp(40.312.711.685,91). Dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 telah termasuk belanja yang bersumber dari Dana Desa, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pembiayaan tahun anggaran 2024 menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp170.097.024.500,63 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp175.097.024.500,63 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan ditambah dengan surplus sebesar Rp(40.312.711.685,91) sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.784.312.814,72.

2. Capaian Kinerja Keuangan Berbasis LO

Laporan operasional Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp1.163.823.500.055,32 dan beban tahun 2024 sebesar Rp1.015.208.316.258,43, dengan demikian diperoleh surplus dari operasi sebesar Rp148.615.183.796,89.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 September 2024 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 November 2024, dianggarkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.560.183.438.647,37. Realisasi pendapatan daerah yang telah masuk ke rekening kas umum daerah selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.552.128.805.972,14 sehingga terjadi pencapaian target di bawah anggaran atau terealisasi 99,48% dari jumlah anggaran pendapatan. Ikhtisar realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	22.062.368.430,37	30.783.762.868,34	139,53
2	Pendapatan Transfer	1.521.621.070.217,00	1.507.603.342.818,80	99,08
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	83,28
Jumlah		1.560.183.438.647,37	1.552.128.805.972,14	99,48

b. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 September 2024 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 November 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp1.730.280.463.148,00. Selama Tahun Anggaran 2024 belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.592.441.517.658,05. Dibandingkan dengan alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

anggarannya, terjadi penyerapan anggaran belanja daerah mencapai 92,03%. Ikhtisar realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA.2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
1	Belanja Operasi	909.171.300.857,39	825.523.799.703,80	90,80
2	Belanja Modal	331.478.943.321,00	292.305.992.715,25	88,18
3	Belanja Tak Terduga	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84
4	Transfer	476.458.645.365,00	472.657.203.439,00	99,20
Jumlah		1.730.280.463.148,00	1.592.441.517.658,05	92,03

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala umum yang dihadapi dalam rangka pencapaian target anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan adalah:

a. Pendapatan Daerah

- 1) Realisasi kondisi lapangan yang kurang sesuai dengan potensi PAD;
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Kurang optimalnya petugas dalam menagih dan memotivasi wajib pajak dan retribusi;

b. Belanja Daerah

- 1) Terjadinya cuaca yang kurang mendukung seperti hujan yang terus menerus saat pekerjaan sedang dilaksanakan seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan;
- 2) Adanya sifat sangat kehati-hatian oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan akibat kurang memahami teknis dan aturan yang dituntut oleh kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan beralamat di Jalan Arah Sorake KM 5 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan tanggal 30 Agustus 2024, pada Tahun Anggaran 2024 jumlah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 63 OPD dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1. Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Komunikasi dan Informatika



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Pendidikan
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Perikanan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip
21	Dinas Pertanian
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23	Dinas Sosial
24	Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
25	Inspektorat
26	Kecamatan Amandraya
27	Kecamatan Aramo
28	Kecamatan Boronadu
29	Kecamatan Fanayama
30	Kecamatan Gomo
31	Kecamatan Hibala
32	Kecamatan Hilimegai
33	Kecamatan Hilisalawa'ahe
34	Kecamatan Huruna
35	Kecamatan Idanotae
36	Kecamatan Lahusa
37	Kecamatan Lolomatua
38	Kecamatan Lolowau
39	Kecamatan LuahagundreManiamolo
40	Kecamatan Maniamolo
41	Kecamatan Mazino
42	Kecamatan Mazo
43	Kecamatan Onohazumba
44	Kecamatan Onolalu
45	Kecamatan O'Ou



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nomor	Organisasi Perangkat Daerah
46	Kecamatan PP.Batu Barat
47	Kecamatan PP.Batu Utara
48	Kecamatan Pulau-Pulau Batu
49	Kecamatan Pulau-Pulau Batu timur
50	Kecamatan Sidua'ori
51	Kecamatan Simuk
52	Kecamatan Somambawa
53	Kecamatan Susua
54	Kecamatan Tanah Masa
55	Kecamatan Teluk Dalam
56	Kecamatan Toma
57	Kecamatan Ulu Idanotae
58	Kecamatan Ulunoyo
59	Kecamatan Ulususua
60	Kecamatan Umbunasi
61	Satuan Polisi Pamong Praja
62	Sekretariat Daerah
63	Sekretariat DPRD

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun Laporan Keuangan adalah basis akrual yang menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa atau bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

1. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu di bayar kembali;
2. Pengakuan Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

3. Pengukuran Pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

1. Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi;
2. Pengakuan Pendapatan–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD, kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
3. Pengukuran Pendapatan–LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
2. Pengakuan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan aset terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa;
3. Pengukuran beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Pengakuan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3. Pengukuran belanja Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.2.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;
3. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

4. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
5. Pengakuan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
6. Pengukuran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.6. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah adalah saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan atau ditunjuk oleh Bupati Nias Selatan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah. Kas disajikan di neraca sebesar nilai nominal;

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara pengeluaran setiap SKPD yang merupakan sisa uang muka kerja (uang persediaan/tambahan uang persediaan) yang sampai per 31 Desember belum disetorkan ke kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

c. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di bendahara FKTP merupakan kas yang berada pada bendahara di setiap puskesmas sebagai penerima dana



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

kapitasi jaminan kesehatan nasional. Sisa kas di bendahara FKTP berasal dari pengelolaan dana kapitasi yang diterima dikurangi dengan belanja atas pelayanan yang mencakup kas yang ada di bank (rekening bendahara FKTP) dan kas tunai. Kas di catat sebesar nilai nominal;

- d. Kas di Bendahara Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Kas di Bendahara dana BOS merupakan kas yang berada pada bendahara di setiap SD Negeri dan SMP Negeri sebagai penerima dana BOS. Sisa kas di bendahara dana BOS berasal dari pengelolaan dana BOS yang diterima dikurangi dengan belanja atas Biaya Operasional Sekolah yang mencakup kas yang ada di bank (rekening bendahara dana BOS) dan kas tunai. Kas di catat sebesar nilai nominal;
- e. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas lainnya yang berada pada Bendahara Pengeluaran merupakan kas tunai hasil pemotongan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan atas transaksi dengan mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan yang sampai per 31 Desember belum disetorkan ke kas negara. Kas di catat sebesar nilai nominal;
- f. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang berada pada tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut bersumber dari pungutan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan seperti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sampai per 31 Desember belum disetorkan ke kas daerah;
- g. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- h. Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi;

i. **Persediaan**

Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada akhir periode akuntansi di catat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*opname*) persediaan;

j. **Investasi Jangka Panjang.**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang dapat berupa Deviden Tunai, Deviden Saham dan Bagian Laba.

2. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan, dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Pengeluaran untuk perbaikan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran untuk perbaikan Jalan Irigasi dan Jaringan yang sama atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
- d. Pengeluaran untuk Instalasi Listrik berupa meteran listrik yang sama atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan ditambah dengan biaya (biaya yang dapat diatribusikan) yang terkait untuk memperoleh aset tetap. Khusus aset tetap yang pengerjaannya melebihi dan atau melewati suatu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut di golongan dan disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dinilai dalam neraca sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap adalah nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Aset tak berwujud meliputi *software* komputer, dan dinilai di neraca sebesar nilai perolehan. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional sehari-hari oleh Pemerintah Daerah seperti Aset yang tidak bermanfaat, Aset dalam Penelusuran dan Aset dimanfaatkan Pihak Lain.

4.2.7. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

1. Utang Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum;

2. Utang Bunga

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya;

3. Utang Jangka Pendek Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan;

4. Utang kepada Pihak ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya.

4.2.8. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya, artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai substansi dan realitas ekonomi;
2. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - a. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- b. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
3. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Prinsip-prinsip kebijakan dan sistem akuntansi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yaitu diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.552.128.805.972,14	1.543.327.013.979,97

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 September 2024 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 November 2024. Realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.552.128.805.972,14 dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.560.183.438.647,37 maka terjadi realisasi di bawah anggaran atau 99,48% terealisasi dari anggaran. Komposisi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Rincian Pendapatan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	22.062.368.430,37	30.783.762.868,34	139,53	37.993.792.368,97
2	Pajak Daerah	9.486.954.849,37	14.023.775.776,15	147,82	14.020.315.098,45
3	Retribusi Daerah	385.605.800,00	284.552.800,00	73,79	197.686.288,00
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.066.435.843,00	6.066.435.843,00	100,00	4.815.589.663,00
5	Lain-lain PAD yang Sah	6.123.371.938,00	10.408.998.449,19	169,99	18.960.201.319,52
6	Pendapatan Transfer	1.521.621.070.217,00	1.507.603.342.818,80	99,08	1.505.333.221.611,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH)	26.492.830.000,00	29.099.426.597,00	109,84	30.497.531.137,00
8	Dana Alokasi Umum	682.305.257.000,00	683.537.602.435,00	100,18	650.139.402.200,00
9	Dana Alokasi Khusus	345.070.652.217,00	336.777.580.562,80	97,60	353.566.063.158,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	23.520.905.000,00
11	Dana Desa	404.618.789.000,00	403.004.364.499,00	99,60	397.908.274.020,00
12	Insentif Fiskal	20.083.542.000,00	20.083.542.000,00	100,00	0,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.050.000.000,00	35.100.826.725,00	87,64	44.209.266.042,00
14	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	5.491.780.054,00
15	Lain-lain Pendapatan yang Sah	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	0,00	0,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000.000,00	13.741.700.285,00	0,00	0,00
Jumlah		1.560.183.438.647,37	1.552.128.805.972,14	99,48	1.543.327.013.979,97

Rincian realisasi pendapatan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.1a



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>30.783.762.868,34</u>	<u>37.993.792.368,97</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.783.762.868,34 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp22.062.368.430,37 terjadi realisasi di atas anggaran atau 139,53%.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>14.023.775.776,15</u>	<u>14.020.315.098,45</u>

Realisasi pendapatan pajak daerah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.023.775.776,15 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp9.486.954.849,00 terjadi realisasi di atas anggaran atau 147,82%. Rincian realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 2. Rincian Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	234.850.000,00	464.552.909,00	197,81	452.085.000,00
2	Pajak Restoran	3.513.116.021,00	5.446.757.002,80	155,04	4.878.106.012,40
3	Pajak Hiburan	0,00	29.435.000,00	100,00	60.375.000,00
4	Pajak Reklame	493.447.510,00	346.238.774,00	70,17	247.623.281,88
5	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000,00	3.830.801.953,00	191,54	3.670.881.920,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	2.000.000.000,00	3.366.001.081,35	168,30	3.697.662.456,82
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	895.541.318,00	343.864.206,00	38,40	828.894.669,35
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	350.000.000,00	196.124.850,00	56,04	184.686.758,00
Jumlah		9.486.954.849,00	14.023.775.776,15	147,82	14.020.315.098,45

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>284.552.800,00</u>	<u>197.686.288,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi pendapatan retribusi daerah selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp284.552.800,00 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp385.605.800,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 73,79%. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Rincian Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000,00	37.666.500,00	376,67	27.736.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31.605.800,00	55.281.002,00	174,91	0,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	94.000.000,00	63.065.000,00	67,09	61.317.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00	100.250.000,00	74,26	107.500.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.132.788,00
6	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minumam Beralkohol	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00	28.290.298,00	282,90	0,00
Jumlah		385.605.800,00	284.552.800,00	73,79	197.686.288,00

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	6.066.435.843,00	4.815.589.663,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pendapatan dividen dan pembagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan surat Direksi PT. Bank. Sumut nomor 107/Dir/SP-SPr/Psh/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Penggunaan Laba Bersih PT Bank Sumut Tahun Buku 2023 untuk Deviden Tunai. Dividen diperoleh atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.066.435.843,00.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama PT Bumi Nisel Cerlang, dan selama Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan penyertaan modal pada PT Bumi Nisel Cerlang sebesar Rp15.000.000.000,00, tahun 2013 dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp15.000.000.000,00, tahun 2015 sebesar Rp24.000.000.000,00, dan pada tahun 2017 dilakukan penambahan modal sebesar Rp2.500.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal tersebut akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk pembagian laba, dan sampai dengan 31



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum mendapatkan laba yang diperoleh karena posisi rugi.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.066.435.843,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.066.435.843,00 maka terjadi realisasi sama dengan anggaran sebesar 100%. Rincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4. Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 Rp	Realisasi 2024 Rp	%	Realisasi 2023 Rp
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Sumut.	6.066.435.843,00	6.066.435.843,00	100	4.815.589.663,00
Jumlah		6.066.435.843,00	6.066.435.843,00	100	4.815.589.663,00

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	10.408.998.449,19	18.960.201.319,52

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.408.998.449,19 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp6.123.371.938,00 terjadi realisasi di atas anggaran atau 169,98%.

Pendapatan dari pengembalian adalah pendapatan yang diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran atau kesalahan perhitungan yang terjadi dalam transaksi keuangan atau transaksi lainnya. Pendapatan ini dapat berupa pengembalian pajak penghasilan, kelebihan pembayaran asuransi, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, dan kelebihan pembayaran lainnya seperti kelebihan biaya perjalanan dinas atau kelebihan pembiayaan atas kegiatan lain. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 5. Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	125.763.000,00	100,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	3.430.612.200,00	3.778.830.182,00	110,15	2.130.013.257,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	14.756,00	0,00	9.666.426,20
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.729.348.879,20	0,00	3.587.826.571,53
5	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	0,00	606.401.309,50	0,00	248.206.296,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	75.000.000,00	56.934.245,00	75,91	278.724.003,79
7	Pendapatan dari Pengembalian	2.617.759.738,00	3.111.706.077,49	118,87	151.095.070,00
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	12.554.669.695,00
Jumlah		6.123.371.938,00	10.408.998.449,19	169,99	18.960.201.319,52

5.1.1.2 Pendapatan Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.507.603.342.818,80</u>	<u>1.505.333.221.611,00</u>

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.507.603.342.818,80 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp1.521.621.070.217,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 99,08%.

Tabel 5. 6. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.478.571.070.217,00	1.472.502.516.093,80	99,59	1.455.632.175.515,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	43.050.000.000,00	35.100.826.725,00	81,54	49.701.046.096,00
Jumlah		1.521.621.070.217,00	1.507.603.342.818,80	99,08	1.505.333.221.611,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.049.414.609.594,80</u>	<u>1.034.202.996.495,00</u>

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.049.414.609.594,80 dibandingkan dengan alokasi anggarannya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp1.053.868.739.217,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 99,58%. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 7. Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	26.492.830.000,00	29.099.426.597,00	109,84	30.497.531.137,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	682.305.257.000,00	683.537.602.435,00	100,18	650.139.402.200,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.406.720.000,00	141.097.087.052,00	99,08	152.927.148.799,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	202.663.932.217,00	195.680.493.510,80	96,55	200.638.914.359,00
Jumlah		1.053.868.739.217,00	1.049.414.609.594,80	99,58	1.034.202.996.495,00

Rincian realisasi per bulan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana terlampir pada lampiran V.2

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	0,00	23.520.905.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada Dana Insentif Daerah (DID) selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Desa	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	403.004.364.499,00	397.908.274.020,0

Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp404.618.789.000,00 terealisasi ke RKUD sebesar Rp403.004.364.499,00 terdapat kurang salur dari pusat sebesar Rp1.614.424.501,00. Realisasi pendapatan dana desa diuraikan pada tabel 5.8.

Tabel 5. 8. Realisasi Pendapatan Dana Desa Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kurang Salur (Rp)
1	Dana Desa	404.618.789.000,00	403.004.364.499,00	1.614.424.501,00
Jumlah		404.618.789.000,00	403.004.364.499,00	1.614.424.501,00

Rincian dan realisasi Dana Desa dan Dana Desa kurang salur dapat dilihat pada lampiran V.3



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.1.2.3.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Insentif Fiskal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>20.083.542.000,00</u>	<u>0,00</u>

Realisasi Insentif Fiskal selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp20.083.542.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp20.083.542.000,00 terjadi realisasi sebesar 100,00%.

5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>35.100.826.725,00</u>	<u>49.701.046.096,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.100.826.725,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp43.050.000.000,00 terjadi realisasi dibawah anggaran atau terealisasi 81,54%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 9. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
I	Pendapatan Bagi Hasil	40.050.000.000,00	35.100.826.725,00	87,64	44.209.266.042,00
1	Kendaraan Bermotor	6.234.510.935,00	4.846.644.872,00	77,74	10.084.554.577,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.144.330.068,00	2.694.858.280,00	85,71	6.858.201.495,00
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.690.811.613,00	5.279.329.555,00	78,90	7.883.294.984,00
4	Pajak Air Permukaan	256.974.793,00	256.974.793,00	100,00	605.794.933,00
5	Pajak Rokok	23.723.372.591,00	22.023.019.225,00	92,83	18.777.420.053,00
II	Bantuan Keuangan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	5.491.780.054,00
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.000.000.000,00	0,00	0,00	5.491.780.054,00
	Jumlah	43.050.000.000,00	35.100.826.725,00	81,54	49.701.046.096,00

5.1.1.3 Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>13.741.700.285,00</u>	<u>12.554.669.695,00</u>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.741.700.285,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Rp16.500.000.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 83,28%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 10. Realisasi Pendapatan JKN pada FKTP Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
1.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.741.700.285,00	12.554.669.695,00
Jumlah		13.741.700.285,00	12.554.669.695,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat 4 (empat) yang menyatakan bahwa Rekening dana kapitasi JKN pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD). Sehingga seluruh kas masuk ke rekening FKTP dari dana kapitasi diakui dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

5.1.2. Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.592.441.517.658,05	1.436.980.765.349,40

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 September 2024 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1/2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 15 November 2024. Jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.730.280.463.148,00. Realisasi Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.592.441.517.658,05. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya terjadi realisasi di bawah anggaran atau 92,03%. Rincian realisasi Belanja Daerah diuraikan di berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 11. Rincian Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja	1.730.280.463.148,00	1.592.441.517.658,05	92,03	1.436.980.765.349,40
1.1.	Belanja Operasi	909.171.300.857,39	825.523.799.703,80	90,80	728.592.793.890,40
1.1.1.	Belanja Pegawai	509.468.114.147,99	455.727.333.392,00	89,45	388.144.685.284,00
1.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.739.527.764,40	283.895.556.571,80	94,09	318.153.245.144,40
1.1.3.	Belanja Subsidi	3.134.177.130,00	829.895.000,00	26,48	2.376.760.000,00
1.1.4.	Belanja Hibah	89.126.239.815,00	80.531.001.740,00	90,36	9.472.965.900,00
1.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	5.703.242.000,00	4.540.013.000,00	79,60	10.445.137.562,00
1.2.	Belanja Modal	331.478.943.321,00	292.305.992.715,25	88,18	243.948.650.092,00
1.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.438.383.812,00	23.014.782.514,33	90,47	70.351.730.324,00
1.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.065.694.848,00	153.659.718.980,92	92,53	61.778.235.064,00
1.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.214.756.511,00	114.104.855.370,00	82,56	109.613.079.303,00
1.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.314.688.650,00	1.083.760.150,00	82,43	2.185.605.401,00
1.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	445.419.500,00	442.875.700,00	99,43	20.000.000,00
1.3.	Belanja Tak Terduga	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84	0,00
1.3.1.	Belanja Tak Terduga	13.171.573.604,61	1.954.521.800,00	14,84	0,00
1.4.	Transfer	476.458.645.365,00	472.657.203.439,00	99,20	464.439.321.367,00
1.4.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	987.256.065,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	475.471.389.300,00	472.657.203.439,00	99,41	464.439.321.367,00

Rincian Realisasi Belanja per OPD dapat dilihat pada lampiran V.4

5.1.2.1. Belanja Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	825.523.799.703,80	728.592.793.890,40

Realisasi belanja operasi selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.825.523.799.703,80. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp909.171.300.857,39 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 90,80% dari jumlah anggaran.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	455.727.333.392,00	388.144.685.284,00

Belanja pegawai merupakan belanja untuk pegawai, baik yang terkait kegiatan secara langsung maupun tidak terkait dengan kegiatan. Belanja pegawai diterima oleh aparatur pemerintah, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparat Sipil Negara, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, penerimaan lainnya, dan pegawai BOS. Realisasi belanja pegawai selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.455.727.333.392,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp.509.468.114.147,99 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 89,45% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 12. Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	338.991.040.647,99	290.612.514.711,00	85,73	247.598.854.493,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.823.327.212,00	37.570.021.731,00	99,33	32.024.434.503,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.588.905.158,00	84.467.992.642,00	97,55	67.988.266.078,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.036.792.927,00	16.776.809.609,00	98,47	16.786.584.584,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.862.130,00	166.592.604,00	86,38	166.935.746,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	511.285.073,00	310.337.095,00	60,70	423.559.380,00
7	Belanja Pegawai Bos	28.323.901.000,00	25.823.065.000,00	91,17	23.156.050.500,00
Jumlah		509.468.114.147,99	455.727.333.392,00	89,45	388.144.685.284,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2024
(Rp)

283.895.556.571,80

Tahun 2023
(Rp)

318.153.245.144,40

Realisasi belanja barang dan jasa selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.895.556.571,80. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp301.739.527.764,40 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 94,09% dari jumlah anggaran. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 13. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	78.695.134.463,91	74.872.430.648,00	95,14	116.722.496.029,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.589.386.100,09	8.842.238.999,00	92,21	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	48.158.698.789,00	43.711.081.353,00	90,76	49.749.031.567,00
4	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	10.551.712.273,00	9.048.544.175,00	85,75	7.346.306.608,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.287.097.000,00	992.514.000,00	0,00	2.709.363.100,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang	2.002.495.000,00	1.793.395.900,00	89,56	923.185.000,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	3.906.681.123,00	3.697.704.864,00	94,65	2.106.185.553,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	0,00	0,00	0,00	209.235.000,00
9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	896.135.000,00	654.691.000,00	73,06	1.259.583.154,00
10	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	597.147.429,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.345.200.565,00	5.448.870.291,00	85,87	5.528.122.599,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.120.710.480,00	908.644.033,00	81,08	2.087.540.214,00
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	848.081.050,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	66.187.842.705,00	64.647.638.323,00	97,67	82.824.023.106,00
15	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.565.798.300,00	1.392.226.300,00	88,91	1.242.602.000,00
16	Belanja Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	1.243.970.000,00	1.187.312.232,00	95,45	902.115.000,00
17	Belanja Barang dan Jasa Bos	33.698.870.965,40	30.864.260.695,80	91,59	43.098.227.735,40
18	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	36.489.795.000,00	35.834.003.758,00	98,20	0,00
Jumlah		301.739.527.764,40	283.895.556.571,80	94,09	318.153.245.144,40

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tahun 2024

Tahun 2023

(Rp)

(Rp)

829.895.000,00

2.376.760.000,00

Belanja subsidi pada Dinas Perhubungan merupakan belanja untuk subsidi angkutan laut sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. RIUS TONE FAST Nomor 500.11/19050/BUP-NS/2023 dan Nomor 29/PT.RTF/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di bidang Transportasi Laut Rute Teluk Dalam-Pulau Tello-Hibala (Pergi Pulang) Tahun Anggaran 2023, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Rius Tone Fast



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Nomor: 500.11.8.6/01/DISHUB/2024 dan Nomor 01/PT.RTF/X/2024 tentang Pemberian Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan antara Teluk Dalam - Pulau Tello (Pergi Pulang) TA.2024, tanggal 02 Januari 2024. Belanja subsidi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan kegiatan belanja yang diselenggarakan pada Pasar Murah Kabupaten Nias Selatan dan diatur dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/274/2024 tentang Pemberian Subsidi Harga Sembako pada Penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, tanggal 25 September 2024. Dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan dengan UD. TOGA GEMILANG Nib. 2909210032411 sebagai Mitra Bulog Wilayah Nias Nomor 510/01/PERINDAG/2024 Nomor 01/TOGA GEMILANG/2024 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Belanja subsidi terealisasi sebesar Rp829.895.000,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp3.134.177.130,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 26,48% dari jumlah anggaran.

Realisasi belanja subsidi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 14. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Subsidi	3.134.177.130,00	829.895.000,00	26,48	2.376.760.000,00
Jumlah		3.134.177.130,00	829.895.000,00	26,48	2.376.760.000,00

Lampiran daftar penerima belanja subsidi tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran V.5a

Belanja subsidi tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada Dinas Perhubungan disebabkan oleh:

1. Belanja subsidi kepada BUMN dalam hal ini subsidi kepada KMP Halfamati HF tidak dapat direalisasikan karena belum adanya serah terima pengoperasian kapal kepada Pihak ASDP sehingga kapal dimaksud belum beroperasi sebagaimana mestinya.
2. Belanja subsidi kepada BUMS dalam hal ini subsidi kepada Kapal Rius Tone tidak dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan Kapal Rius Tone mengalami kerusakan dan hanya aktif beroperasi sampai dengan bulan Agustus 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.1.4 Belanja Hibah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	80.531.001.740,00	9.472.965.900,00

Berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/805/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/350/2024 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nominal Belanja Hibah di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Belanja Hibah merupakan belanja yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 900.1.10/331/BKBP/2024 dan Nomor 95/KU.07-NK/1214/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024, NPHD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 900.1.10/5004/BKBP/2024 dan Nomor 004/HK.02/K.SU-14/02/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil upati Nias Selatan Tahun 2024 dan NPHD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Kepolisian Resort Nias Selatan Nomor 900.1.10/3318/BKBP/2024 dan Nomor B/50/I/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 serta NPHD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan Komando Distrik Militer 0213/Nias Nomor 900.1.10/3312/BKBP/2024 dan Nomor B/40/I/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.

Belanja hibah merupakan belanja hibah kepada instansi vertikal, badan/ lembaga/organisasi swasta. Realisasi belanja hibah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.531.001.740,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp89.126.239.815,00 terjadi realisasi dibawah anggaran atau 90,36% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 15. Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.897.159.815,00	78.981.885.815,00	97,63	8.173.000.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.340.000.000,00	1.319.172.120,00	98,45	1.299.965.900,00
3	Belanja Hibah Dana BOSP (PAUD)	6.889.080.000,00	229.943.805,00	3,34	0,00
Jumlah		89.126.239.815,00	80.531.001.740,00	90,36	9.472.965.900,00

Daftar Penerima Hibah TA.2024 dapat dilihat pada lampiran V.5b

Pada NPHD Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima hibah sebesar Rp53.272.967.815,00 dan melakukan pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tanggal 02 Mei 2025 sebesar Rp8.496.624.716,00 dan NPHD Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima hibah sebesar Rp12.636.692.000,00 dan melakukan pengembalian ke RKUD pada tanggal 22 April 2025 sebesar Rp1.371.973.887,00.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	4.540.013.000,00	10.445.137.562,00

Belanja bantuan sosial merupakan belanja bantuan sosial yang dapat diberikan kepada perorangan, kelompok organisasi masyarakat. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan telah diatur dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/990/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/361/2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Kategori Beasiswa Kurang Mampu/Miskin dan Kategori Beasiswa Berprestasi di Bidang Akademik Tahun Anggaran 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Realisasi belanja bantuan sosial selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.540.013.000,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp5.703.242.000,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 79,60% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 16. Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	5.703.242.000,00	4.540.013.000,00	79,60	10.445.137.562,00
JUMLAH		5.703.242.000,00	4.540.013.000,00	79,60	10.445.137.562,00

Daftar Penerima Bantuan Sosial TA.2024 dapat dilihat pada lampiran V.6a

5.1.2.2 Belanja Modal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>292.305.992.715,25</u>	<u>243.948.650.092,00</u>

Belanja modal merupakan pengeluaran belanja untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan atau dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Belanja modal meliputi nilai kontrak ditambah seluruh biaya yang terkait untuk memperoleh aset tetap seperti biaya administrasi umum, jasa konsultan. Realisasi belanja modal selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp292.305.992.715,25 atau terealisasi 88,18% dari jumlah alokasi anggarannya sebesar Rp331.478.943.321,00. Realisasi belanja modal dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 5. 17. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	25.438.383.812,00	23.014.782.514,33	90,47	70.351.730.324,00
2	Gedung dan Bangunan	166.065.694.848,00	153.659.718.980,92	92,53	61.778.235.064,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.214.756.511,00	114.104.855.370,00	82,56	109.613.079.303,00
4	Aset Tetap Lainnya	1.314.688.650,00	1.083.760.150,00	82,43	2.185.605.401,00
5	Aset Lainnya	445.419.500,00	442.875.700,00	99,43	20.000.000,00
Jumlah		331.478.943.321,00	292.305.992.715,25	88,18	243.948.650.092,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja modal tanah merupakan belanja pemerintah untuk memperoleh tanah yang digunakan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Belanja tanah meliputi harga perolehan dan ditambah biaya lainnya seperti biaya



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

jasa penilai harga tanah. Realisasi belanja modal tanah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal	Tahun 2024	Tahun 2023
Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	23.014.782.514,33	70.351.730.324,00

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja Pemerintah untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan dan menunjang pelayanan kepada masyarakat. Realisasi belanja peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.014.782.514,33. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp25.438.383.812,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 90,47% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 18. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Alat Bantu	254.873.387,00	254.260.000,00	99,76	113.520.476,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.793.637.200,00	2.939.270.000,00	77,48	3.112.430.000,00
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	1.679.219.280,00	1.677.900.000,00	99,92	15.548.581.710,00
4	Alat Bengkel Tak bermesin	13.802.195,00	6.433.560,00	46,61	0,00
5	Alat Ukur	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	
6	Alat Pengolahan	8.248.000,00	8.248.000,00	100,00	32.194.334,00
7	Alat Kantor	172.506.637,00	142.567.475,00	82,64	467.324.302,00
8	Alat Rumah Tangga	4.000.167.251,00	3.800.122.649,00	95,00	1.695.669.369,00
9	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	410.563.732,00	329.591.335,00	80,28	717.526.049,00
10	Alat Studio	64.281.475,00	64.164.723,73	99,82	353.083.950,00
11	Alat Komunikasi	90.056.240,00	80.928.052,00	89,86	58.150.000,00
12	Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	1.864.675.127,00
13	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	2.590.775.000,00	2.590.211.000,00	99,98	1.000.000.000,00
14	Alat Kesehatan umum	3.665.388.185,00	3.386.922.606,00	92,40	36.522.920.754,00
15	Komputer Unit	2.767.214.093,00	2.510.653.288,60	90,73	2.543.205.331,00
16	Peralatan Komputer	770.725.222,00	689.050.245,00	89,40	6.110.338.922,00
18	Alat Pelindung	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	83.700.000,00
17	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	128.410.000,00
19	Peralatan dan Mesin BOS	4.994.525.915,00	4.372.209.580,00	87,54	0,00
Jumlah		25.438.383.812,00	23.014.782.514,33	90,47	70.351.730.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>153.659.718.980,92</u>	<u>61.778.235.064,00</u>

Belanja modal bangunan dan gedung merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah dan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal bangunan dan gedung untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp153.659.718.980,92. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp166.065.694.848,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 92,53%. Rincian realisasi belanja bangunan dan gedung sebagai berikut:

Tabel 5. 19. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung dan Tempat Kerja	165.951.718.848,00	153.545.853.980,92	92,52	61.709.933.985,00
2	Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	113.976.000,00	113.865.000,00	99,90	68.301.079,00
	Jumlah	166.065.694.848,00	153.659.718.980,92	92,53	61.778.235.064,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>114.104.855.370,00</u>	<u>109.613.079.303,00</u>

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan jalan, pembukaan badan jalan, pengaspalan jalan, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jembatan, pembangunan *duikerplat*, pembangunan bronjong, pembangunan drainase, pembangunan irigasi, pembangunan sarana air bersih, pembangunan air minum, dan instalasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.104.855.370,00. Dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp138.214.756.511,00 realisasi di bawah anggaran atau terealisasi 82,56%. Rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 20. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jalan	96.296.950.989,00	73.297.635.136,00	76,12	76.880.446.724,00
2	Jembatan	7.174.320.581,00	7.161.738.716,00	99,82	6.273.207.668,00
3	Bangunan Air Irigasi	139.500.000,00	138.793.136,00	99,49	647.449.980,00
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.940.233.265,00	5.909.457.591,00	99,48	6.023.970.573,00
5	Bangunan Air Kotor	3.337.074.733,00	3.270.256.889,00	98,00	1.071.983.083,00
6	Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.511.556.800,00	2.460.000.000,00	97,95	99.800.000,00
7	Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	1.948.451.344,00
8	Jaringan Air Minum	15.327.108.143,00	14.767.527.192,00	96,35	16.667.769.931,00
9	Jaringan Listrik	7.488.012.000,00	7.099.446.710,00	94,81	0,00
Jumlah		138.214.756.511,00	114.104.855.370,00	82,56	109.613.079.303,00

**5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya**

**Tahun 2024
(Rp)**

**Tahun 2023
(Rp)**

1.083.760.150,00

2.185.605.401,00

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja pemerintah untuk perolehan buku dan kepustakaan, barang bercorak kebudayaan dan renovasi. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.083.760.150,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp1.314.688.650,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau realisasi 82,43% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 21. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	381.228.660,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	1.574.909.241,00
3	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	229.467.500,00
4	Aset Tetap Lainnya BOS	1.314.688.650,00	1.083.760.150,00	82,43	0,00
Jumlah		1.314.688.650,00	1.083.760.150,00	82,43	2.185.605.401,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>442.875.700,00</u>	<u>20.000.000,00</u>

Belanja modal aset lainnya merupakan belanja pemerintah untuk perolehan aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal aset lainnya selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp442.875.700,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp445.419.500,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau realisasi 99,43% dari jumlah anggaran. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 22. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud-Software	245.419.500,00	244.075.000,00	99,45	20.000.000,00
2	Aset Tidak Berwujud-Kajian	200.000.000,00	198.800.700,00	99,40	0,00
Jumlah		445.419.500,00	442.875.700,00	99,43	20.000.000,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.954.521.800,00</u>	<u>0,00</u>

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai keadaan penanganan keadaan darurat akibat bencana alam atau peristiwa yang tidak biasa dan tidak diduga. Realisasi Belanja tak terduga selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.954.521.800,00. Realisasi belanja tak terduga terdiri dari Kegiatan tanggap darurat non alam, Pengembalian Dana BOSP, BOK dan Salah Setor PPH dan PPN. Belanja Tidak Terduga Kegiatan Tanggap Darurat Non Alam ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/639/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Nias Selatan sebagai bencana kejadian luar biasa dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor 400.7/695/VII/2024 tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria dan Demam Berdarah Dengue. Realisasi belanja tak terduga selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.954.521.800,00. Dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp13.171.573.604,61 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 14,84%. Rincian realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada table berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 23. Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
1	Kegiatan tanggap darurat non alam	1.899.383.200,00	0,00
2	Pengembalian BOSP	17.588.600,00	0,00
3	Pengembalian BOK	25.550.000,00	0,00
4	Pengembalian Salah Setor PPH dan PPN	12.000.000,00	0,00
JUMLAH		1.954.521.800,00	0,00

Daftar realisasi BTT Kegiatan Tanggap Darurat Non Alam dapat dilihat pada lampiran V.6b

5.1.2.2 Belanja Transfer	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	472.657.203.439,00	464.439.321.367,00

Belanja transfer merupakan belanja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi dan bantuan keuangan kepada desa dan bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Realisasi belanja transfer bantuan keuangan ke desa tahun 2024 sebesar Rp472.657.203.439,00. Alokasi Dana Desa Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/70/2023 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jumlah penerima dana desa sebanyak 459 desa dari 35 kecamatan. Realisasi belanja transfer selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp472.657.203.439,00 dibandingkan dengan alokasi anggarannya sebesar Rp476.458.645.365,00 terjadi realisasi di bawah anggaran atau 99,20%. Rincian realisasi belanja transfer dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 5. 24. Realisasi Belanja Transfer TA. 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kurang Salur 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	987.256.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	475.471.389.300,00	472.657.203.439,00	2.814.185.861,00	99,41	464.439.321.367,00
	Dana Desa	404.619.012.300,00	403.006.050.439,00	1.612.961.861,00	99,60	397.908.274.020,00
	Alokasi Dana Desa	70.852.377.000,00	69.651.153.000,00	1.201.224.000,00	98,30	66.334.769.595,00
	Penyaluran Sisa Alokasi Dana Desa TA. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	196.277.752,00
Jumlah		476.458.645.365,00	472.657.203.439,00	2.814.185.861,00	99,41	464.439.321.367,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Rincian dan realisasi Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa kurang salur dapat dilihat pada lampiran V.7a dan V.7b

5.1.2.3 Surplus/Defisit	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>(40.312.711.685,91)</u>	<u>106.346.248.630,57</u>

Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan setelah dikurangi dengan belanja dan transfer. Pada tahun anggaran 2024 terdapat defisit sebesar (Rp40.312.711.685,91) dibandingkan dengan alokasi anggaran defisit sebesar (Rp170.097.024.500,63) terjadi defisit dibawah alokasi anggaran atau 23,70%.

5.1.3. Pembiayaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Netto	(Rp)	(Rp)
	<u>170.097.024.500,63</u>	<u>68.750.775.870,06</u>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran entitas. Pembiayaan daerah adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp170.097.024.500,63 dibandingkan dengan alokasi anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp170.097.024.500,63 terjadi realisasi sebesar anggaran atau 100%.

5.1.3.1 Penerimaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembiayaan	(Rp)	(Rp)
	<u>175.097.024.500,63</u>	<u>73.250.775.870,06</u>

Penerimaan pembiayaan tahun 2024 merupakan penerimaan atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.097.024.500,63

5.1.3.2 Pengeluaran	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembiayaan	(Rp)	(Rp)
	<u>5.000.000.000,00</u>	<u>4.500.000.000,00</u>

Pengeluaran pembiayaan merupakan transaksi pengeluaran yang bertujuan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun anggaran 2024 pengeluaran



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

pembiayaan dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi 5.000.000.000,00 atau terjadi realisasi 100%. Realisasi pengeluaran pembiayaan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 25. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD (Bank SUMUT)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00
Jumlah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	4.500.000.000,00

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>129.784.312.814,72</u>	<u>175.097.024.500,63</u>

Dari realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp129.784.312.814,72. SiLPA tersebut diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5. 26. Uraian Hasil Perhitungan SiLPA Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum	87.293.157.335,72	132.002.489.301,75
	DAU Murni	43.146.250.176,72	25.966.795.289,55
	DAU yang ditentukan penggunaannya	13.865.556.658,00	8.815.620.340,00
	Dana Pilkada	0,00	28.650.776.143,20
	Penyertaan Modal	0,00	5.000.000.000,00
	Belanja Tak Terduga	0,00	9.558.656.879,00
	DAU PPPK (untuk gaji tahun 2024)	5.199.812.000,00	0,00
	Tambahan Dukungn Pendanaan atas Kebijakan PPPK	24.781.985.801,00	54.010.640.650,00
	Sisa Dukungn THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru AS	299.552.700,00	0,00
2.	DBH CHT	15.069.981.534,00	23.300.564.196,00
	DBH Sawit	11.681.581.279,00	11.925.812.000,00
	THR 50% TPG TAMSIL	0,00	2.533.389.000,00
	DBH Dana Reboisasi	0,00	16.865.556,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	20.765.454,00	217.667.200,00
	Dana Insentif Fiskal (IF)	3.367.634.801,00	8.606.830.440,00
3.	Dak Fisik Reguler	4.394.779.509,00	12.563.806.515,21
	Reguler Pendidikan	206.156,00	91.327,21
	Sub Bidang Sanitasi	236.200,00	10.093.000,00
	Sub Bidang Air Minum- Penugasan	122.965.048,00	1.364.764.873,00
	DAK Fisik Penugasan Jalan	81.340,00	0,00
	Dak Fisik Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan I	2.365.731.151,00	0,00
	Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	0,00	2.846.553.800,00
	Jalan Peningkatan Konektovotas dan Elektrifikasi di Daer	0,00	5.048.830.320,00
	Transportasi Pedesaan- Penugasan	1.905.412.614,00	2.575.109.500,00
	Transportasi Perairan	0,00	90.191.937,00
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	627.983.608,00
	P2KBP3A	147.000,00	188.150,00
	Dak Fisik 2023	13.013.882.944,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.	DAK Non Fisik	8.884.785.215,00	3.441.668.328,00
	Pertanian	24.703.812,00	517.910,00
	Admindak	0,00	42.030.401,00
	KapasitasKoperasi dan UKM	12.802.440,00	11.759.836,00
	Penanaman Modal	0,00	12.571.700,00
	BO KB	340.889.600,00	688.767.200,00
	BOK	1.326.715.758,00	1.107.754.676,00
	TKG	6.976.244.900,00	468.023.000,00
	TPG	0,00	937.128.900,00
	Tamsil	198.709.914,00	168.395.914,00
	Dak Non Fisik-kepariwisataan	4.718.791,00	4.718.791,00
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	1.739.188.953,00
6.	Rekening Pengeluaran Dana Desa	0,00	1.187.986.346,47
7.	Dana JKN	1,00	31.402.600,00
8.	Dana BOK	948.108.242,00	448.840.358,00
9.	Dana BOS	179.618.034,00	380.830.968,20
10.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	216.374,00
11.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	30.560,00
	Saldo Anggaran Lebih	129.784.312.814,72	175.097.024.500,63

Silpa pada DAU murni terdapat pemakaian kekurangan bayar terhadap TPG tahun 2024 sebesar Rp424.999.300,00. Hal ini terjadi karena adanya penurunan pagu sesuai KMK Nomor 423 tahun 2024 pada tanggal 25 November 2024. Sementara pergeseran anggaran sudah ditetapkan pada tanggal 15 November 2024, Sehingga tidak dapat dilakukan lagi penyesuaian anggaran sesuai KMK tersebut.

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>175.097.024.500,63</u>	<u>73.250.775.870,06</u>

Saldo anggaran lebih awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran lebih awal pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp175.097.024.500,63.

5.2.2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>175.097.024.500,63</u>	<u>73.250.775.870,06</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp175.097.024.500,63.

5.2.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2024 (Rp) <hr/> 129.784.312.814,72	Tahun 2023 (Rp) <hr/> 175.097.024.500,63
---------------	---	---	---

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.784.312.814,72.

5.2.4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Tahun 2024 (Rp) <hr/> 0,00	Tahun 2023 (Rp) <hr/> 0,00
---------------	---	---	---

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00

5.2.5.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2024 (Rp) <hr/> 129.784.312.814,72	Tahun 2023 (Rp) <hr/> 175.097.024.500,63
---------------	---------------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.784.312.814,72 Perbandingan Saldo Anggaran Lebih Akhir diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 27. Laporan Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
I.	Saldo Anggaran Lebih Awal	175.097.024.500,63	73.250.775.870,06
1.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	175.097.024.500,63	73.250.775.870,06
	Sub Total	0,00	0,00
2.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	129.784.312.814,72	175.097.024.500,63
	Sub Total	129.784.312.814,72	175.097.024.500,63
3.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00
II.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	129.784.312.814,72	175.097.024.500,63

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.784.312.814,72 sebagaimana telah disajikan pada tabel 5.27 diatas.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1. ASET	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.236.054.947.553,95</u>	<u>2.093.581.719.082,25</u>

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.236.054.947.553,95 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp166.880.168.773,40, investasi jangka panjang sebesar Rp74.035.943.523,00 aset tetap sebesar Rp1.963.936.727.018,28 dan aset lainnya sebesar Rp31.202.108.239,27.

5.3.1.1 Aset Lancar	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>166.880.168.773,40</u>	<u>193.262.315.932,23</u>

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.880.168.773,40 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp128.656.586.537,52, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp1,00, Kas lainnya sebesar Rp160.395.463,00, Kas Dana BOS Rp179.618.034,20, Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp948.108.242,00, Piutang Pajak Daerah sebesar Rp14.300.480.918,98, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp4.042.873.707,00, Piutang Transfer Pusat Pemerintah Rp0,00, Piutang Transfer Antar Daerah Rp18.361.427.799,00, Penyisihan Piutang (Rp10.389.635.669,30) dan Persediaan sebesar Rp10.620.313.740,00

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>128.656.586.537,52</u>	<u>174.235.703.640,43</u>

Jumlah kas di kas daerah merupakan saldo kas rekening Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.656.586.537,52 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 28. Kas di Kas Daerah

No	Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000307.0	0,00	0,00
2	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000308.0	128.656.586.537,52	173.047.717.293,96
3	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000309.0	0,00	0,00
4	PT Bank BRI Cabang Teluk Dalam	2036.01.000552.30.1	0,00	1.187.986.346,47
5	PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam	271.01.02.000321.0	0,00	0,00
Jumlah Saldo Kas			128.656.586.537,52	174.235.703.640,43

Informasi lainnya adalah pada kas di kas daerah terdapat uang sebesar Rp.645.762.000,00 yang berasal dari setoran beberapa orang yang menguasai 17 aset kendaraan roda 4 pada tanggal 01 Juli 2019 sebagaimana data terlampir pada lampiran V.1b. Proses lelang tersebut tidak diakui oleh pejabat lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Padang Sidempuan. Pendapatan dimaksud tidak bisa dicatat pada akun pendapatan hasil penjualan aset dikarenakan proses lelang aset dimaksud sedang ditangani oleh aparat penegak hukum dan pada Neraca Pemerintah kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2024 aset kendaraan roda empat dimaksud belum dilakukan penghapusan.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang ada pada bendahara penerimaan yang bersumber dari potongan pajak makan dan minum atau pungutan Pajak Asli Daerah sudah disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>216.374,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas di bendahara pengeluaran tahun 2024 dan tahun sebelumnya yang berasal dari sisa uang persediaan dan tambahan uang persediaan dan sampai per 31 Desember 2024 belum disetor ke kas daerah. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember 2024 seperti diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 29. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per OPD

No	OPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	0,00	159.179,00
2	Kantor Camat Ulunoyo	0,00	57.195,00
Jumlah		0,00	216.374,00

5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1,00</u>	<u>31.433.160,00</u>

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 menurut buku kas umum masing-masing FKTP sebesar Rp1,00 merupakan sisa kas di rekening bendahara FKTP dari pengelolaan dana non kapitasi TA.2024 sebesar Rp0,00 dan sisa kas tunai di bendahara FKTP dari pengelolaan dana kapitasi TA. 2024 sebesar Rp1,00 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Jumlah Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.30 berikut:

Tabel 5. 30. Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi FKTP

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	UPTD Puskesmas Teluk Dalam	0,00	3.794.200,00
2	UPTD Puskesmas Luahagundre	0,00	4.797.100,00
3	UPTD Puskesmas Bawomataluo	0,00	362,00
4	UPTD Puskesmas Hilisimaetano	0,00	5.817.671,00
5	UPTD Puskesmas Hilisataro	0,00	9.545,00
6	UPTD Puskesmas Hilizalootano	0,00	0,00
7	UPTD Puskesmas Lahusa	0,00	115,00
8	UPTD Puskesmas Onolalu	0,00	1.203,00
9	UPTD Puskesmas Lolomatua	0,00	6.601.524,00
10	UPTD Puskesmas Lolowau	0,00	345,00
11	UPTD Puskesmas Hilimegai	0,00	1.138,64
12	UPTD Puskesmas Aramo	0,00	706,81
13	UPTD Puskesmas Amandraya	0,00	613,79



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
14	UPTD Puskesmas Susua	0,00	526,34
15	UPTD Puskesmas Ulususua	0,00	0,00
16	UPTD Puskesmas O'Ou	0,00	0,00
17	UPTD Puskesmas Hilisalawa`ahe	0,00	153,09
18	UPTD Puskesmas Onohazumba	0,00	583,79
19	UPTD Puskesmas Huruna	0,00	3.301,50
20	UPTD Puskesmas Ulunoyo	0,00	403,68
21	UPTD Puskesmas Somambawa	0,00	0,00
22	UPTD Puskesmas Siduaori	0,00	0,00
23	UPTD Puskesmas Gomo	0,00	10.397.298,80
24	UPTD Puskesmas Boronadu	0,00	241,00
25	UPTD Puskesmas Idanotae	0,00	1.451,12
26	UPTD Puskesmas Ulu Idanotae	0,00	833,00
27	UPTD Puskesmas Mazo	0,00	157,02
28	UPTD Puskesmas Umbunasi	0,00	380,23
29	UPTD Puskesmas Pulau Tello	0,00	683,93
30	UPTD Puskesmas Simuk	0,00	303,29
31	UPTD Puskesmas PP.Batu Barat	0,00	341,98
32	UPTD Puskesmas PP.Batu Utara	0,00	958,80
33	UPTD Puskesmas PP. Batu Timur (Labuhan Hiu)	0,00	198,06
34	UPTD Puskesmas Tanah Masa	0,00	324,81
35	UPTD Puskesmas Hibala	0,00	111,52
36	UPTD Puskesmas Hilianombasela Hibala	1,00	383,80
Jumlah		1,00	31.433.160,00

Uraian rinci mutasi saldo kas dana kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada lampiran V.8a dan V.8b

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<u>160.395.463,00</u>	<u>611.615.359,00</u>

Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan kas yang ada di bendahara pengeluaran yang bersumber dari pungutan pajak (PPN dan PPh) atas transaksi belanja yang sampai per 31 desember 2024 belum disetor ke kas negara sebesar Rp160.395.463,00.

Tabel 5. 31. Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per OPD

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	149.820.233,00	149.820.233,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	10.575.230,00	10.575.230,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	0,00	2.379.538,00
4	Kas Dana BOK	0,00	448.840.358,00
JUMLAH		160.395.463,00	611.615.359,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Dijelaskan bahwa kas lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

1. Kas lainnya PPh 21 Dinas Pendidikan tahun 2015 sebesar Rp149.820.233,00;
2. Kas lainnya PPh 22 di Dinas PUPR tahun 2013 sebesar Rp10.575.230,00.

5.3.1.1.6 Kas Dana BOSP	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	179.618.034,20	380.830.968,20

Saldo kas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp179.618.034,20 merupakan sisa kas yang belum digunakan oleh Sekolah Negeri (PAUD, SD dan SMP). Jumlah pendapatan dana yang diterima oleh sekolah sebesar Rp62.210.231.695,00 dan belanja sebesar Rp62.373.239.230,80. Dijelaskan bahwa sumber pendapatan dana yang diterima oleh sekolah terdiri dari Dana BOS (BOS Reguler dan Kinerja yang bersumber dari Pusat), BOP PAUD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.32 berikut ini.

Tabel 5. 32. Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana BOSP Tahun 2024

No	Sekolah	Saldo Akhir 2023	Koreksi Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Jumlah Dana Masuk	Jumlah Realisasi	Saldo Akhir 2024
01	PAUD	38.144.250,00	(38.144.250,00)	0,00	230.392.305,00	229.943.805,00	448.500,00
02	SD	213.530.837,60	1,80	213.530.839,40	39.459.140.018,00	39.551.044.454,00	121.626.403,40
03	SMP	129.094.730,60	0,00	129.094.730,60	22.520.699.372,00	22.592.250.971,80	57.543.130,80
04	KESETARAAN	61.150,00	(61.150,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		380.830.968,20	(38.205.398,20)	342.625.570,00	62.210.231.695,00	62.373.239.230,80	179.618.034,20

Rincian kas Dana BOSP setiap Sekolah dapat dilihat pada lampiran V.9a, V.9b.

Dijelaskan adanya perubahan pada saldo awal 2024 di kas bendahara dana bos tahun 2024 menjadi Rp342.625.570,00 karena adanya koreksi saldo akhir tahun 2023. Hal ini terjadi karena Dana BOP PAUD (Rp38.205.400,00) merupakan milik swasta dan Dana BOS sebesar Rp1,80 merupakan kesalahan pencatatan pada pengesahan belanja.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	948.108.242,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada puskesmas untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan kesehatan, terutama upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif. Realisasi BOK tahun anggaran 2024 sebesar Rp948.108.242,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 33. Rincian Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

NO	PUSKESMAS	PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)
1	UPTD Puskesmas Amandraya	2.722.692,00	290.419,00
2	UPTD Puskesmas Aramo	30.390.915,00	337.438,00
3	UPTD Puskesmas Bawomataluo	25.793.700,00	11.531.596,00
4	UPTD Puskesmas Boronadu	246.909,00	67.357,00
5	UPTD Puskesmas Gomo	33.627.953,00	65.161.056,00
6	UPTD Puskesmas Hibala	889.753,00	3.382.764,00
7	UPTD Puskesmas Hilianombasela	2.590.378,00	0,00
8	UPTD Puskesmas Hilimegai	43.804.732,00	205.477,00
9	UPTD Puskesmas Hilisalawaaha	30.347.564,00	1.910.608,00
10	UPTD Puskesmas Hilisataro	83.606.837,00	1.801.588,00
11	UPTD Puskesmas Hilisimaetano	11.316.635,00	15.924.014,00
12	UPTD Puskesmas Hilizalo'otano	5.228.625,00	99.494,00
13	UPTD Puskesmas Huruna	4.560.089,00	17.213.176,00
14	UPTD Puskesmas Idanotae	9.993.387,00	2.621.611,00
15	UPTD Puskesmas Labuhan Hiu	143.200.197,00	24.894,00
16	UPTD Puskesmas Lahusa	32.677.793,00	23.279.903,00
17	UPTD Puskesmas Lolomatua	7.677.561,00	4.118.008,00
18	UPTD Puskesmas Lolowau	1.805.360,00	26.558.627,00
19	UPTD Puskesmas Luahagundre Maniamolo	6.885.723,00	12.544.211,00
20	UPTD Puskesmas Mazo	7.875.000,00	39.516.993,00
21	UPTD Puskesmas Onohazumba	8.196.064,00	13.005.647,00
22	UPTD Puskesmas Onolalu	8.212.713,00	3.145.909,00
23	UPTD Puskesmas O'ou	12.413.027,00	3.491.049,00
24	UPTD Puskesmas Pulau Tello	1.031.076,00	2.100.402,00
25	UPTD Puskesmas Pulau-Pulau Batu Barat	8.519.245,00	3.213.735,00
26	UPTD Puskesmas Pulau-Pulau Batu Utara	3.490.319,00	14.481.784,00
27	UPTD Puskesmas Siduaori	35.077.197,00	24.553.533,00
28	UPTD Puskesmas Simuk	4.661.605,00	1.417.707,00
29	UPTD Puskesmas Somambawa	4.960.302,00	17.878.886,00
30	UPTD Puskesmas Susua	108.542.554,00	17.965.495,00
31	UPTD Puskesmas Tanah Masa	3.418.934,00	3.557.693,00
32	UPTD Puskesmas Teluk Dalam	191.963.832,00	96.232.706,00
33	UPTD Puskesmas Ulu Idanotae	3.710.006,00	13.283.608,00
34	UPTD Puskesmas Ulunoyo	4.622.598,00	1.035.045,00
35	UPTD Puskesmas Ulususua	57.815.979,00	4.917.709,00
36	UPTD Puskesmas Umbunasi	6.230.988,00	1.970.216,00
	TOTAL	948.108.242,00	448.840.358,00

Uraian rincian Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dapat dilihat pada lampiran V.10



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>14.300.480.918,98</u>	<u>13.194.795.217,00</u>

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.300.480.918,98. Piutang Pajak Daerah merupakan pajak daerah yang telah ditetapkan nilainya dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah namun belum ada penyetoran dari wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024. Mutasi piutang pajak daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 34. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Pelunasan 2014-2023	Tambahan Piutang 2024	Saldo Akhir 2024
1	Piutang Pajak Hotel	1.795.293.000,00	110.000.000,00	24.350.000,00	1.709.643.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	651.634.100,00	19.582.000,00	47.353.500,00	679.405.600,00
3	Piutang Pajak Hiburan	191.940.000,00	3.250.000,00	5.550.000,00	194.240.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	5.108.986.048,00	82.831.595,00	504.055.094,98	5.530.209.547,98
5	Piutang Pajak PBBP2	5.446.942.069,00	140.273.771,00	880.314.473,00	6.186.982.771,00
	Jumlah	13.194.795.217,00	355.937.366,00	1.461.623.067,98	14.300.480.918,98

5.3.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>4.042.873.707,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.042.873.707,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan semua piutang yang timbul dari sumber pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kategori piutang pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang Lain-lain PAD yang sah dalam hal ini terjadi karena adanya piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-imbak jasa penjaminan karena kekurangan jaminan uang muka belum dicairkan atas kelebihan pembayaran progres fisik untuk pekerjaan pembangunan kantor pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Dinas PUTR sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp3.167.425.004,00 berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 25.b/PT.DUE.SE/KONS-PWS-BG/BAK/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 atas pembangunan kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Surat dari PT. DANRUS UTAMA ENGINEERING Nomor 018/DUE-TD/SE-PWS/BG/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Laporan Final Quantity Pekerjaan. Dan karena



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Kekurangan Jaminan Pelaksanaan Belum dicairkan atas Kelebihan Pembayaran Progres Fisik untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Dinas PUTR sebesar Rp712.164.403,00 berdasarkan surat dari INTRA JAYA INSURANCE Nomor Jaminan IP021102082400028 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jaminan Pelaksanaan. Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 35. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Imbal Jasa Penjaminan - Jaminan Uang Muka Belum dicairkan atas Kelebihan Pembayaran Progres Fisik untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Dinas PUTR	3.167.425.004,00
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Imbal Jasa Penjaminan - Jaminan Pelaksanaan Belum dicairkan atas Kelebihan Pembayaran Progres Fisik untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan Dinas PUTR	712.164.403,00
3	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	163.284.300,00
TOTAL		4.042.873.707,00

5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>4.493,00</u>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang belum ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 36. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

Uraian	Saldo Akhir Tahun 2023	Berkurang Tahun 2024 (Diterima)	Saldo Akhir Tahun 2024
Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat TA. 2023	4.493,00	4.493,00	0,00

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>18.361.427.799,00</u>	<u>2.046.245.764,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.361.427.799,00. Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang belum ditransfer ke rekening kas umum daerah Kabupaten Nias Selatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.365.701.526,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022, tanggal 22 April 2025. Dan Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran. 2024 yang dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.995.726.273,00 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/2288 tanggal 12 Maret 2025 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran. 2024 yang dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada lampiran V.11

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	(10.389.635.669,30)	(8.649.811.446,40)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.389.635.669,30). Penyisihan piutang merupakan nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau diperoleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024. Penyisihan piutang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 37. Penyisihan Piutang Pajak

No	Uraian	Nilai Penyisihan Piutang 2024	Nilai Penyisihan Piutang 2023
1	Pajak Hotel	(1.371.466.350,00)	(1.004.903.450,00)
2	Pajak Restoran	(510.491.650,00)	(388.248.825,00)
3	Pajak Reklame	(4.041.983.239,67)	(3.383.223.304,75)
4	Pajak Hiburan	(135.512.750,00)	(86.155.000,00)
5	PBB	(4.330.181.679,63)	(3.787.276.373,65)
6	Transfer Pemerintah Pusat	0,00	(4.493,00)
Jumlah		(10.389.635.669,30)	(8.649.811.446,40)

Rincian penyisihan piutang per jenis pajak dapat dilihat pada lampiran V.12

5.3.1.1.13 Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	10.620.313.740,00	11.411.282.403,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.620.313.740,00. Rekapitulasi Nilai persediaan per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 38. Rekapitulasi Nilai Persediaan

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Pakai Habis, Bahan Material, Bahan Cetak dan Penggandaan dan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.067.095.450,00	51.265.550,00
2	Obat dan Alat Kesehatan	9.553.218.290,00	11.360.016.853,00
Jumlah		10.620.313.740,00	11.411.282.403,00

Rincian saldo persediaan per OPD dapat di lihat pada lampiran V.13

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>74.035.943.523,00</u>	<u>69.049.996.987,00</u>

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.035.943.523,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.985.946.536,00. Kenaikan nilai investasi jangka panjang disebabkan oleh adanya Penyertaan Modal Daerah pada BUMD (PT. Bank Sumut) sebesar Rp5.000.000.000,00 dan rugi tahun berjalan pada PT BNC sebesar (Rp.14.053.464,00).

5.3.1.2.1 Penyertaan Modal	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>74.035.943.523,00</u>	<u>69.049.996.987,00</u>

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan merupakan investasi di suatu entitas bisnis pada lembaga yang dipertahankan dalam jangka panjang dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Penyertaan modal pada PT. Bumi Nisel Cerlang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang (BNC) Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang (BNC) Kabupaten Nias Selatan dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada PT. Bank Sumut. Realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sampai per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.100.730.000,00. Rincian penyetoran penyertaan modal dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5. 39. Penyetoran Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan**

No	Uraian	Tahun	Jumlah
		Penyetoran	(Rp)
I	PT. Bank Sumut Tbk		30.600.730.000,00
1	Setoran Pertama	2005	277.834.000,00
2	Setoran Kedua	2006	277.834.000,00
3	Setoran Ketiga	2007	750.000.000,00
4	Pembayaran Premi Saham	2007	(116.408.000)
5	Setoran Keempat	2011	2.000.000.000,00
6	Setoran Kelima	2012	1.200.000.000,00
7	Setoran Keenam	2013	2.000.000.000,00
8	Setoran Ketujuh	2017	5.000.000.000,00
9	Setoran Kedelapan	2018	2.000.000.000,00
10	Setoran Kesembilan	2019	6.819.654.530,00
11	Setoran Kesepuluh	2021	891.813.186,00
12	Koreksi Penyesuaian Sesuai Hasil RUPS	2022	2.284,00
13	Setoran Kesebelas	2023	4.500.000.000,00
14	Setoran Keduabelas	2024	5.000.000.000,00
II	BUMD (PT. Bumi Nisel Cerlang)		56.500.000.000,00
1	Setoran Pertama	2012	15.000.000.000,00
2	Setoran Kedua	2013	15.000.000.000,00
3	Setoran Ketiga	2015	24.000.000.000,00
4	Setoran Keempat	2017	2.500.000.000,00
Jumlah I + II			87.100.730.000,00

Jumlah investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT. Bank Sumut per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.600.730.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa kepemilikan saham kurang dari 20% maka menggunakan metode biaya untuk penilaian investasi. Jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT Bank Sumut kurang dari 20%, sehingga dalam penilaian investasi menggunakan metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya maka nilai investasi sebesar harga perolehan, sehingga nilai investasi saham Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT Bank Sumut per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.600.730.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Nisel Cerlang sampai per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.500.000.000,00. Terhadap modal PT Bumi Nisel Cerlang seluruhnya merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT. Bumi Nisel Cerlang dilakukan dengan metode ekuitas. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT. Bumi Nisel Cerlang Unaudited atau belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sehingga diperoleh kondisi keuangan pada laporan perubahan ekuitas hingga per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5. 40. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
pada BUMD PT Bumi Nisel Cerlang**

Tahun	Modal Disetor	Laba (Rugi)	Saldo Investasi
2012	15.000.000.000,00	(771.674.485)	14.228.325.515,00
2013	15.000.000.000,00	(1.446.158.109)	27.782.167.406,00
2014	0,00	(1.595.007.105)	26.187.160.301,00
2015	24.000.000.000,00	(4.217.097.375)	45.970.062.926,00
2016	0,00	(723.091.186)	45.246.971.740,00
2017	2.500.000.000,00	(2.705.395.837)	45.041.575.903,00
2018	0,00	(920.776.800)	44.120.799.103,00
2019	0,00	(338.166.262)	43.782.632.841,00
2020	0,00	(254.134.565)	43.528.498.276,00
2021	0,00	(28.197.825)	43.500.300.451,00
2022	0,00	(37.066.792)	43.463.233.659,00
2023	0,00	(13.966.672)	43.449.266.987,00
2024	0,00	(14.053.464)	43.435.213.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan kondisi laporan perubahan ekuitas PT. BNC per 31 Desember 2024, maka nilai investasi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan di PT BNC per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.435.213.523,00. Dari uraian penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dan laba/rugi pada BUMD PT. BNC, maka saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp74.035.943.523,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 41. Saldo Investasi Jangka Panjang

Uraian	Penyertaan Modal	Saldo Laba (Rugi)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
PT Bumi Nisel Cerlang			
Saldo 31 Desember 2024	56.500.000.000,00	(13.064.786.477,00)	43.435.213.523,00
PT Bank Sumut			
Saldo 31 Desember 2024	30.600.730.000,00		30.600.730.000,00
Jumlah	87.100.730.000,00	(13.064.786.477,00)	74.035.943.523,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Tahun 2024

Tahun 2023

(Rp)

(Rp)

1.963.936.727.018,28

1.799.917.484.900,17

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.963.936.727.018,28 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp3.440.194.225.954,28 dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.476.257.498.936,00). Rekapitulasi mutasi aset tetap per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 42. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31-12-2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31-12-2024 (Rp)
1	Tanah	239.804.029.367,08	6.522.705.615,05	373.762.501,05	245.952.972.481,08
2	Peralatan dan Mesin	373.428.619.718,94	33.474.580.979,83	24.249.400.857,83	382.653.799.840,94
3	Gedung dan Bangunan	1.119.075.288.472,07	155.859.948.541,95	29.942.182.628,19	1.244.993.054.385,83
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.394.136.467.292,93	142.342.123.369,61	36.866.260.039,73	1.499.612.330.622,81
5	Aset Tetap Lainnya	6.859.584.332,71	2.325.020.300,00	1.162.510.150,00	8.022.094.482,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.301.620.734,61	31.749.336.734,30	24.090.983.328,00	58.959.974.140,91
7	Akumulasi Penyusutan	(1.384.688.125.018,17)			(1.476.257.498.936,00)
8	Jumlah	1.799.917.484.900,17			1.963.936.727.018,28



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.1 Tanah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	245.952.972.481,08	239.804.029.367,08

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp245.952.972.481,08 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5. 43. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Persil	130.910.299.733,48
2	Tanah Non Persil	15.227.180,00
3	Tanah Lapangan	115.027.445.567,60
	Jumlah	245.952.972.481,08

Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 44. Rincian Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Jlh	Nilai Perolehan
		Persil	(Rp)
I	Tanah Persil		
	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Tinggal	18	1.062.813.598,00
	Tanah Bangunan Perumahan Tempat Perdagangan	64	2.157.360.991,00
	Tanah Bangunan Tempat Kerja	797	127.387.562.644,48
	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga	1	200.000.000,00
	Jumlah Tanah Persil	880	130.807.737.233,48
II	Tanah Non Persil		
	Tanah Basah	1	1.200.000,00
	Tanah Pertanian	5	14.027.180,00
	Jumlah Tanah Non Persil	6	15.227.180,00
III	Tanah Lapangan		
	Tanah Lapangan Olahraga	4	216.253.120,00
	Tanah Lapangan Parkir	5	815.740.000,00
	Tanah Lapangan Penimbunan Barang/Sampah	2	5.454.942.416,00
	Tanah Lapangan Terbang	10	33.363.168.584,00
	Tanah Untuk Jalan	254	74.484.488.523,20
	Tanah Bangunan Air	50	692.852.924,40
	Tanah Lainnya	1	102.562.500,00
	Jumlah Tanah Lapangan	326	115.130.008.067,60
	Jumlah I + II + III	1.212	245.952.972.481,08



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pada tahun 2024 saldo tanah terjadi kenaikan atau penambahan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp245.952.972.481,08 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 45. Mutasi Saldo Tanah Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	239.804.029.367,08
Penambahan :	
Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung	6.522.705.614,00
Jumlah Pertambahan	246.326.734.981,08
Pengurangan	
Penghapusan karena Hibah	271.200.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	102.562.500,00
Jumlah Pengurangan	373.762.500,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	245.952.972.481,08

Rincian mutasi aset tetap tanah per OPD dapat dilihat pada lampiran V.14

- Jumlah aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk tahun 2024 mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan adanya Penghapusan karena hibah tanah kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1042/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Reklasifikasi Aset Tanah menjadi Aset Tetap Bangunan Gedung di Kantor Camat Siduaori, yang menyebabkan berkurangnya jumlah aset tetap tanah dari 1.214 persil menjadi 1.212 persil dan telah dihapuskan dari Daftar Barang Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 46. Hibah tanah kepada BAKAMLA RI

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Luas (M ²)	Sertifikat	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2007	Desa Orahili Gito Kecamatan Fanayama (Kawasan Alo'oa)	13.560	12.23.18.19.4.0000. 3 Tahun 2019	271.200.000,00	Telah ada bangunan Pendopo diatas tanah

Tabel 5. 47. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Bangunan Gedung pada OPD Kecamatan Siduaori

Nama Unit	Nama Aset	Tgl Perolehan	Alamat	Harga Perolehan	Keterangan
KANTOR CAMAT SIDUA'ORI	lapangan lainnya	31/12/2020	Desa Ulu Idanoduo	102.562.500,00	Pembuatan Paving blok (mutasi dari D Perumahan)



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Dari jumlah aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebanyak 1.212 persil, telah bersertifikat sebanyak 284 persil.
- Reklasifikasi dari belanja modal gedung merupakan gedung dan bangunan, dimana didalam kontraknya terdapat pekerjaan yang bersifat menambah nilai tanah, sehingga aset tersebut diklasifikasikan pada aset tanah.

Tabel 5. 48. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung Tahun 2024

No	Nama Spesifik	Lokasi	Harga Perolehan	OPD
1	Tanah Bangunan Rumah Sakit	RSUD Nias Selatan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
2	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 077310 Lolomaya	200.107.301,00	Dinas Pendidikan
3	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 4 Lolomatua	230.627.468,00	Dinas Pendidikan
4	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 078581 Cerdas Amuri	300.085.233,00	Dinas Pendidikan
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Onohazumba	250.131.868,00	Dinas Pendidikan
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 075069 Botohili Silambo	231.858.283,00	Dinas Pendidikan
7	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 074071 Bawodobara	26.374.448,00	Dinas Pendidikan
8	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Aramo	250.108.361,00	Dinas Pendidikan
9	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 4 Fanayama	250.120.035,00	Dinas Pendidikan
10	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 078495 Lolozaria	250.068.979,00	Dinas Pendidikan
11	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Ulu Idanotae	299.876.124,00	Dinas Pendidikan
12	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 078520 Tetegewo	299.959.597,00	Dinas Pendidikan
13	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 071130 Eho	279.731.304,00	Dinas Pendidikan
14	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 3 Ulu Idanotae	230.541.729,00	Dinas Pendidikan
15	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Umbunasi	300.001.283,00	Dinas Pendidikan
16	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 071189 Ehosakhozi	230.589.741,00	Dinas Pendidikan
17	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 075076 Hilinamoniha	200.247.947,00	Dinas Pendidikan
18	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 2 Toma	250.196.897,00	Dinas Pendidikan
19	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 078141 Tetezou	200.139.573,00	Dinas Pendidikan
20	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 6 Huruna	230.615.475,00	Dinas Pendidikan
21	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 076727 Hiliamaetaluo	185.159.841,00	Dinas Pendidikan
22	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Lahusa	199.347.082,00	Dinas Pendidikan
23	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 1 Pulau-Pulau Batu Utara	299.931.470,00	Dinas Pendidikan
24	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SD Negeri 071217 Sifalago Susua Boe	416.691.617,00	Dinas Pendidikan
25	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 2 Susua	510.125.699,00	Dinas Pendidikan
26	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SMP Negeri 3 Somambawa	300.068.259,00	Dinas Pendidikan
Jumlah			6.522.705.614,00	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	382.653.799.840,94	373.428.619.718,94

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp382.653.799.840,94 dengan rincian berdasarkan rincian objek sebagai berikut :

Tabel 5. 49. Rekapitulasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian	Saldo	
		Per 31 - 12 - 2024	Per 31 - 12 - 2023
1	Alat Besar	16.508.901.739,00	16.284.721.476,00
2	Alat Angkutan	105.924.090.428,28	108.418.347.479,36
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.554.762.268,00	6.392.028.993,00
4	Alat Pertanian	753.668.209,00	440.999.079,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.922.059.925,85	50.694.710.410,43
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	9.830.492.814,14	7.600.485.811,65
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	83.926.901.881,17	83.505.835.881,17
8	Alat Laboratorium	29.163.613.279,63	28.996.536.530,52
9	Alat Persenjataan	634.870.823,00	520.653.411,00
10	Komputer	70.996.646.882,32	67.194.420.285,37
11	Alat Eksplorasi	5.703.340,00	5.703.340,00
12	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	27.508.646,55	27.508.640,44
13	Alat Bantu Eksplorasi	7.000.000,00	0,00
14	Alat Keselamatan Kerja	288.003.300,00	257.043.300,00
15	Alat Peraga	33.192.450,00	33.192.450,00
16	Rambu-Rambu	2.231.491.901,00	2.221.491.901,00
17	Peralatan Olahraga	844.891.953,00	834.940.730,00
Jumlah		382.653.799.840,94	373.428.619.718,94

Mutasi saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 50. Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	373.428.619.718,94
<i>Penambahan:</i>	
Belanja Modal	23.014.782.514,33
Reklas dari BM Gedung	91.483.000,00
Reklas dari BM Jalan Irigasi dan Jaringan	176.446.710,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa/Operasi	431.091.442,00
Mutasi dari OPD	14.296.000,00
Koreksi Pencatatan/Kesalahan	135.080.829,78
Reklas antar sub	79.799.999,49
Reklasifikasi antar Kelompok	5.057.859.524,23
Reklasifikasi antar kelompok barang/reklasifikasi ke KIB A/B/C/D/E	4.473.740.960,00
Jumlah Penambahan	33.474.580.979,83



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

<i>Pengurangan:</i>	
Mutasi dari OPD	14.296.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa/Operasi	3.678.062.965,00
Koreksi harga perolehan tahun lalu atas kesalahan pencatatan	24,03
Reklasifikasi aset lain-lain	7.353.570.980,00
Penghapusan	774.830.998,90
Reklasifikasi antar kelompok barang/reklasifikasi ke KIB A/B/C/D/E	86.296.100,00
Reklas antar Kelompok	4.960.762.112,23
Reklas antar sub	130.428.811,49
Koreksi	7.500.038,18
Hibah ke sekolah swasta	109.898.224,00
Reklasifikasi ke barang ekstrakomtabel	7.133.754.604,00
Jumlah Pengurangan	24.249.400.857,83
Saldp Akhir per 31 Desember 2024	382.653.799.840,94

Rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada lampiran V.15

- Penghapusan aset tetap dari daftar barang pengguna barang dan pengelola barang merupakan penghapusan dikarenakan barang tidak dalam penguasaan Pengelola Barang sebagai akibat telah diserahkan kepada pihak lain karena pemindahtanganan dengan penjualan tanpa Lelang kepada Pimpinan DPRD senilai Rp. 694.894.000,00 dan hibah kepada Pemerintah Desa Golambanua II Kecamatan Somambawa senilai Rp. 79.936.998,90 dengan total keseluruhan Rp.774. 830.998,90. Penghapusan ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 000.2.4/29409/6148/BPKPAD/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang. Rincian daftar sebagai berikut :

Tabel 5. 51. Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan berupa kendaraan Perorangan Dinas yang dihapuskan karena Penjualan tanpa Lelang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Jenis Kendaraan	Merk / Type	No. Mesin	No. Rangka	Warna	Tahun Pembuatan	No. Polisi	Harga Perolehan
1	Mobil Penumpang/ Mini Bus	Toyota Kijang Innova 2.0 V M/T	1 TL-8825427	MHFXW43G-7F4094221	Hitam Metalik	2015	BB 14 W	324.074.000
2	Mobil Penumpang/ Mini Bus	Toyota Kijang Innova 2.0 Q M/T	1 TR-A174964	MHFAW8E M 1G0204088	Silver Metalik	2016	BB 1077 W	370.820.000
Jumlah								694.894.000



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 52. Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan berupa Peralatan Mesin yang dihapuskan karena Hibah kepada Pemerintah Desa Golambanua II Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Tahun	Bahan	Harga (Rp)
1	Alat angkutan apung tak bermotor lainnya	1.3.2.02.004.004.001	28 Unit	2019	Fiber	79.936.998,90

- Pembelian peralatan dan mesin merupakan perolehan peralatan dan mesin dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang anggarannya tertuang dalam APBD. Biaya pembelian meliputi harga beli ditambah seluruh biaya administrasi umum hingga Barang Milik Daerah (BMD) tersebut siap untuk digunakan dalam operasional pemerintahan.
- Reklasifikasi antar aset tetap dari belanja modal gedung dan bangunan merupakan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal gedung dan bangunan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kontrak dan dokumen serah terima, terdapat barang berupa peralatan dan mesin dalam kontrak tersebut, sehingga dilakukan pengelompokan pencatatan. Jenis barang yang direklasifikasi dari aset tetap belanja modal gedung berupa alat kantor dan rumah tangga, seperti meja, kursi, perlengkapan rumah dinas guru.
- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa yaitu pembelian BMD berupa peralatan dan mesin yang perolehannya pada anggaran belanja barang dan jasa atau belanja operasi, sehingga pada pencatatan BMD dikelompokkan pada peralatan dan mesin sesuai dengan fisiknya.
- Mutasi dari OPD yaitu perpindahan aset tetap dari OPD ke OPD lain.
- Pemberian hibah peralatan dan mesin ke sekolah swasta merupakan barang milik daerah berupa Meubelair senilai Rp. 90.115.224,00 dan Alat Permainan Edukatif (APE) senilai Rp. 19.783.000,00 dengan total keseluruhan Rp109.898.224,00. Adapun rincian barang dan sekolah penerima hibah barang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 53. Daftar Sekolah Penerima Hibah Meubelair

No	Rincian Barang		Nilai	Sekolah Penerima
	Meja	Kursi		
1	20	40	29.450.761,00	SMP Swasta Taman Indah Sejati
2	10	20	15.606.851,00	SMP Swasta Kristen BNKP Pulau Tello
3	10	20	15.606.851,00	SD Swasta Bintang Laut
4	20	40	29.450.761,00	SMP Swasta Kristen BNKP Teluk Dalam
Total			90.115.224,00	



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 54. Daftar Sekolah Penerima Hibah Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai	Nama Sekolah
1	Alat Permainan Edukatif (APE)	1 Paket	19.783.000,00	TK Swasta Emanuel
Total			19.783.000,00	

- Pada Tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bernilai 0 sebanyak 8 unit dan bernilai 1 sebanyak 2 unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 55. Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan berupa Peralatan Mesin yang telah dilakukan Penilaian

No	Nama Unit	No Reg	Nama Aset	Bahan	Tgl Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Harga Perolehan Penilaian
1	Sekretariat DPRD/DPRD	752	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
2	Sekretariat DPRD/DPRD	1283	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
3	Sekretariat DPRD/DPRD	1499	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
4	Sekretariat DPRD/DPRD	1500	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
5	Sekretariat DPRD/DPRD	1935	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
6	Sekretariat DPRD/DPRD	2005	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
7	Sekretariat DPRD/DPRD	2212	Jam Elektronik	Kaca, Plastik	31/12/2010	0	Aset ada di Gudang Setwan Kab. Nisel	128.571,00
8	Dinas Kesehatan	62	Alat Kesehatan Umum lainnya	Plastik	31/12/2008	0	Aset ada di Gudang Dinas Kesehatan Kab. Nisel	832.500,00
9	Dinas Pendidikan	58	Meja Kerja Kayu	Kayu	31/12/2010	1	Aset ada di SD NEGERI 076101 HILIZARIA	300.000,00
10	Dinas Pendidikan	111	Kursi Kayu	Plastik	31/12/2015	1	Aset ada di SD NEGERI 076101 HILIZARIA	245.000,00

Penilaian Peralatan Mesin di atas dilakukan dengan berpedoman pada harga barang yang sejenis di OPD yang sama. Setelah dilakukan penilaian maka barang-barang tersebut dikelompokkan ke Aset Ekstrakomtabel karena nilainya di bawah batas minimum kapitalisasi.

Reklasifikasi ke barang Ekstrakomtabel merupakan aset tetap yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi minimum. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2023 atas Perubahan Perbub 151 tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan, bab VIII pasal 10 ayat 1 (satu) menyatakan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 terbilang satu juta rupiah.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Memperhatikan Buletin Teknis Akuntansi Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, pada Bab III Akuntansi Peralatan dan Mesin yang menyatakan bahwa, pengakuan peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca, sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin yang tampil pada lembar muka neraca hanya aset tetap Intrakomptabel. Jumlah nilai pertambahan barang Ekstrakomptabel tahun ini sebesar Rp 7.133.754.604,00 sehingga nilai perolehan aset tetap ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 Sebesar 50.178.636.398,99 Rekapitulasi nilai aset tetap Ekstrakomptabel dapat dilihat pada tabel 5. 50 rincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.244.993.054.385,83</u>	<u>1.119.075.288.472,07</u>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.244.993.054.385,83 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5. 56. Rekapitulasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.172.538.200.231,32	1.047.146.195.749,70
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	61.477.434.414,00	61.477.434.414,00
3	Bangunan Menara/Monumen	1.966.389.412,00	1.966.389.412,00
4	Banguna Tugu/Titik Kontrol/Pagar	9.011.030.328,51	8.485.268.896,37
Jumlah		1.244.993.054.385,83	1.119.075.288.472,07

Mutasi saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 57. Rekapitulasi Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	1.119.075.288.472,07
Penambahan :	
Belanja Modal	153.659.718.980,92
Reklas dr Belanja Barang /Operasi	1.263.678.638,00
Reklasifikasi dari KDP tahun lalu	428.794.675,00
Koreksi Harga Perolehan Tahun Lalu Kesalahan pencatatan)	8,95
Reklas antar sub	457.692.240,00
Jumlah Penambahan	155.809.884.542,87
Pengurangan :	
Hibah ke Sekolah Swasta	5.790.022.172,00
Penghapusan	4.991.755.000,00
Reklasifikasi ke aset tetap KDP	6.479.481.876,30
Reklas Antar KIB A/B/C/D/E/F	5.188.675.651,92
Koreksi pencatatan	3,18
Reklas ke Barang Jasa	460.372.500,00
Reklas antar sub	6.777.835.354,70
Koreksi Kurang Volume	30.476.147,01
Pembayaran Utang Belanja Tahun 2023 (dicatat BMD) dibayar di 2024	149.523.924,00
Aset Ekstrakomptabel	23.976.000,00
Jumlah Pengurangan	29.892.118.629,11
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	1.244.993.054.385,83

Rincian mutasi aset gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.16

- Perolehan gedung pada tahun 2024 meliputi pembangunan gedung baru seperti kantor camat, ruang kelas baru (RKB), rumah dinas guru, gedung perpustakaan, jamban siswa, lanjutan pembangunan rumah dinas, pembangunan puskesmas, rehabilitasi ruang kelas dan rehabilitasi gedung kantor. Biaya perolehan meliputi biaya kontrak dan ditambah dengan seluruh biaya pendukung untuk menghasilkan gedung tersebut. Dalam pencatatan aset gedung, pengeluaran setelah pembangunan awal berupa rehabilitasi/renovasi dikapitalisasi pada aset induknya.
- Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa merupakan belanja pemeliharaan/renovasi gedung yang penganggarnya dan realisasinya pada belanja barang dan jasa. Mengingat pekerjaan fisik yang dilakukan menambah manfaat ekonomi dan kapasitas gedung dimasa yang akan datang maka belanja tersebut di reklasifikasi dengan kapitalisasi ke aset tetap gedung induk.
- Reklasifikasi dari KDP merupakan gedung yang tahun lalu dalam proses pengerjaan dan tahun anggaran 2024 pekerjaan dilanjutkan dan telah selesai hingga gedung siap untuk dimanfaatkan. Sehingga pencatatannya beralih ke aset tetap gedung.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Perolehan aset dari utang merupakan pengakuan aset tetap dari belanja modal gedung yang pekerjaannya secara fisik telah selesai walaupun belum seluruhnya di bayarkan sesuai dengan kontrak.
- Pada Tahun 2024 dilakukan Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tiga OPD antara lain PUTR, DINKES dan DISDIK dengan total nilai Rp. 6.479.481.876,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58.

Mutasi Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan	OPD
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.272.986.421,30	Desa Bawozaua	PUTR
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	312.900.998,00	Kantor Camat Ulunoyo	PUTR
3	Bangunan Puskesmas Pembantu	224.235.000,00	Pembangunan Puskesmas Pembantu Bintang Baru Kecamatan Susua	DINKES
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.068.704.257,00	Pembangunan Gedung SD Negeri 078564 Orahuahili	DISDIK
5	Bangunan Dermaga	600.655.200,00	Bangunan Dermaga Lanal	DISHUB
Jumlah		6.479.481.876,30		

Gedung dan Bangunan yang dimutasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terdapat biaya penunjang sebesar Rp460.372.500 yang merupakan Biaya Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan.

- Pada Tahun 2024 dilakukan Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung dari OPD Dinas Perizinan ke OPD BPKPD hal ini dikarenakan Dinas Perizinan telah melakukan Pemerliharaan Gedung Kantor yang tercatat pada BPKPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59. Mutasi antar OPD Gedung dan Bangunan Tahun 2024

Dari Dinas Perizinan ke BPKPD

No	Nama Unit	Kode Aset	Nama Aset	Tgl Perolehan	Lokasi	Harga Perolehan	Ket.	Catatan Penyelesaian
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor	31/12/2019	Jl. Diponegoro Kel. Pasar T.Dalam	50.064.000,00	Renovasi Gedung	Aset induknya tercatat di KIB BPKPD dan di akan Mutasi dari Kib Perizinan ke Kib BPKPD

Penghapusan aset tetap dari daftar barang pengguna barang dan pengelola barang merupakan penghapusan dikarenakan barang tidak dalam penguasaan Pengelola Barang sebagai akibat telah diserahkan kepada pihak lain (BAKAMLA RI) karena pemindahtanganan dengan cara hibah. Penghapusan ini telah



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/1042/2024/tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang. Jumlah nilai perolehan barang yang telah dihapuskan dari KIB Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengelola Barang sebesar Rp 4.991.755.000, dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 5. 60. Daftar BMD berupa Gedung dan Bangunan yang dihapuskan karena Hibah kepada BAKAMLA RI

No.	Kode Lokasi	Nama Barang	Konstruksi Bangunan	Luas (M ²)	Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
1	12.01.12.14.110301 (Dinas PUPR)	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pendopo)	Beton, Tidak Bertingkat	400	Desa Orahili Gito Kecamatan Fanayama (Kawasan Alo'oa)	2008	4.991.755.000,00

- Pemberian hibah ke sekolah swasta merupakan barang milik daerah yang penggunaannya dan pemeliharannya diserahkan kepada sekolah. Adapun sekolah penerima hibah barang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 61. Hibah BMD Gedung dan Bangunan Kepada Sekolah

No	Sekolah Penerima Hibah BMD	Keterangan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	TK Swasta Emanuel	Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya	1 paket	247.967.191,00
2	PAUD Simandraolo Oou	Pembangunan Jamban	1 paket	200.016.644,00
3	PAUD Kash Desa Nituwuboho	Pembangunan Gedung	1 paket	230.593.674,00
4	PAUD Lolozeria	Pembangunan Gedung	1 paket	250.057.023,00
5	TK K ST Antonius	Rehabilitasi Gedung	1 paket	300.031.115,00
6	TK Swasta Rai Ora Batu	Pembangunan Ruang Kelas Belajar	1 paket	91.683.356,00
7	PAUD Sisarahili Susua	Pembangunan Gedung	1 paket	230.582.532,00
8	SD Swasta Persiapan Negeri Orahili Fondrako	Pembangunan Ruang Kelas	1 paket	277.124.257,00
9	SMP Swasta Persiapan Negeri 4 Ullusua	Pembangunan Gedung	1 paket	699.424.257,00
10	PAUD BNKP Mazo	Pembangunan Gedung	1 paket	300.024.333,00
11	TK Swasta Garuda Harapan Masa Depan Desa Lawindra	Pembangunan Gedung	1 paket	230.677.161,00
12	PAUD Orahuahili	Pembangunan Jamban	1 paket	200.113.218,00
13	SPS BNKP Jemaat Hilihoya	Pembangunan Gedung	1 paket	250.180.319,00
14	SMP Swasta Kristen BNKP Mazino	Pembangunan Gedung	1 paket	731.604.495,00
15	TK Baithani	Pembangunan Gedung	1 paket	250.061.099,00
16	PAUD Vanohosi	Pembangunan Gedung	1 paket	250.038.981,00
17	PAUD Chaterine Velove	Pembangunan Gedung	1 paket	300.002.639,00
18	SMP Taman Indah Sejati	Pembangunan Gedung	1 paket	450.015.621,00
19	PAUD Hilsataro Nandisa	Pembangunan Gedung	1 paket	299.824.257,00
Total				5.790.022.172,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.499.612.330.622,81</u>	<u>1.394.136.467.292,93</u>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.499.612.330.622,81 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5. 62.
Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Jalan	911.586.668.632,14	855.114.684.000,26
2	Jembatan	173.839.479.786,97	163.633.977.803,97
3	Bangunan Air/Irigasi	246.856.196.065,70	237.730.670.197,70
4	Instalasi	104.713.592.648,90	81.963.741.801,90
5	Jaringan	62.616.393.489,10	55.693.393.489,10
Jumlah		1.499.612.330.622,81	1.394.136.467.292,93

Mutasi saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 63. Mutasi Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

Saldo per 31 Desember 2023	1.394.136.467.292,93
Penambahan :	
Belanja modal	114.104.855.370,00
Belanja operasi	5.216.562.633,00
Reklasifikasi ke Gedung	644.462.191,92
Reklasifikasi antar sub kelompok	1.685.918.950,00
Reklasifikasi dari KDP	20.494.763.649,00
Jumlah Penambahan	142.146.562.793,92
Pengurangan :	
Pembayaran utang tahun belanja tahun 2023 (dicatat BMD) dibayar di tahun 2024	6.211.788.533,00
Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	176.446.710,00
Reklasifikasi ke KDP	25.269.854.858,00
Reklas ke Barang Jasa	3.170.487.024,00
Reklasifikasi antar sub aset	1.685.918.949,00
Koreksi Kurang Volume	156.203.366,20
Koreksi pencatatan	23,84
Jumlah Pengurangan	36.670.699.464,04
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.499.612.330.622,81

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada lampiran V.17



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Pada Tahun 2024 dilakukan Mutasi Aset Tetap Jaringan Air Minum dari OPD Dinas PUPR ke OPD Dinas Kesehatan hal ini dikarenakan Dinas PUPR telah melakukan Pemeliharaan Jaringan Air Minum di RSUD Lukas yang tercatat pada Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 64. Mutasi antar OPD Jaringan Air Minum Tahun 2024
Dari Dinas PUPR ke Dinas Kesehatan**

No	Nama Unit	Kode Aset	No Reg	Nama Aset	Tgl Perolehan	Lokasi	Harga Perolehan	Keterangan	Catatan Penyelesaian
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.4.4.1.5.1	627	Jaringan air minum lainnya	31/12/2018	Kec. Maniamolo	195.560.569,50	Pemeliharaan Sarana Air bersih Di rumah Sakit Umum LUKAS Hilisimaetano Kec. Maniamolo	dimutasikan Ke Dinas Kesehatan (Rumah Sakit LUKAS)

- Pada Tahun 2024 dilakukan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada OPD PUTR dengan total nilai Rp. 25.269.854.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Nama Barang	Nilai	Keterangan	OPD
1	Jalan Kabupaten Lokal	178.918.009,00	Jalan dari Simpang Kantor Dinas PUPR menuju Kantor Dinas Kesehatan	PUTR
2	Jalan Kabupaten Lokal	5.022.904.284,00	Jalan Poros Desa Siwalawa Kecamatan Fanayama menuju Desa Hilimondregeraya Kecamatan Onolalu	PUTR
3	Jalan Kabupaten Lokal	797.249.596,00	Jl. Bawomataluo	PUTR
4	Jalan Kabupaten Lokal	739.919.311,00	Jl. Bawogosali	PUTR
5	Jalan Kabupaten Lokal	5.000.164.132,00	Jl. Hilizalootano	PUTR
6	Jalan Kabupaten Lokal	7.899.701.614,00	Jl. Mazino	PUTR
7	Jalan Kabupaten Lokal	2.138.607.338,00	Jl. Hilisaloo	PUTR
8	Jalan Kabupaten Lokal	748.500.000,00	Jl. Dari Kantor DPRD- Bawomataluo	PUTR
9	Jalan Kabupaten Lokal	417.816.000,00	Jl. Bawodobara	PUTR
10	Jalan Kabupaten Lokal	593.402.607,00	Jalan Mazo	PUTR
11	Jalan Kabupaten Lokal	552.731.815,00	Jalan Sambulu	PUTR
12	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1.179.940.152,00	Desa Bawogonowo Kecamatan Toma	PUTR
Jumlah		25.269.854.858,00		

Terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimutasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terdapat biaya penunjang sebesar Rp. 2.230.487.024,00 yang merupakan Biaya Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan dan Perjalanan Dinas.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	8.022.094.482,71	6.859.584.332,71

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.022.094.482,71 yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5. 66. Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	7.932.235.481,70	6.769.725.331,70
2	Barang Bercorak Kesenian/Budaya	34.459.001,01	34.459.001,01
3	Hewan	0,00	0,00
4	Tanaman	24.320.000,00	24.320.000,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	31.080.000,00	31.080.000,00
Jumlah		8.022.094.482,71	6.859.584.332,71

Mutasi saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 67. Rekapitulasi Nilai Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	6.859.584.332,71
Penambahan :	
Belanja modal	1.083.760.150,00
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	78.750.000,00
Jumlah Penambahan	1.162.510.150,00
Pengurangan :	
Jumlah Pengurangan	0,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	8.022.094.482,71

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada lampiran V.18

- Pada Tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap Aset Tetap Lainnya yang bernilai 0 sebanyak 26 unit dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 68. Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan berupa Aset Tetap Lainnya yang telah dilakukan Penilaian

No	Nama OPD	No Reg	Nama Aset	Nama Aset	Tgl Perolehan	Judul	Harga Perolehan Penilaian
1	Dinas Pendidikan	81060	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T6 Menuju Masyarakat Sejahtera	19.500,00
2	Dinas Pendidikan	119700	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T7 Kepemimpinan	20.400,00
3	Dinas Pendidikan	129000	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
4	Dinas Pendidikan	197310	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Matematika	57.000,00
5	Dinas Pendidikan	197344	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T9 Menjelajah Angkasa Luar	28.900,00
6	Dinas Pendidikan	210250	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T9 Menjelajah Angkasa Luar	28.900,00
7	Dinas Pendidikan	223207	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T8 Bumiku	19.500,00
8	Dinas Pendidikan	249055	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T6 Menuju Masyarakat Sejahtera	19.500,00
9	Dinas Pendidikan	323202	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
10	Dinas Pendidikan	374849	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
11	Dinas Pendidikan	387551	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
12	Dinas Pendidikan	490875	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
13	Dinas Pendidikan	542422	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
14	Dinas Pendidikan	607291	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
15	Dinas Pendidikan	624238	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T4 Globalisasi	20.400,00
16	Dinas Pendidikan	645948	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
17	Dinas Pendidikan	649759	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T4 Globalisasi	20.400,00
18	Dinas Pendidikan	662644	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T4 Globalisasi	20.400,00
19	Dinas Pendidikan	688650	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T5 Wirausaha	25.500,00
20	Dinas Pendidikan	736848	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	Bahasa Indonesia	18.600,00
21	Dinas Pendidikan	753703	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T5 Wirausaha	25.500,00
22	Dinas Pendidikan	766576	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T5 Wirausaha	25.500,00
23	Dinas Pendidikan	779388	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T5 Wirausaha	25.500,00
24	Dinas Pendidikan	792252	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2019	T4 Globalisasi	20.400,00
25	Dinas Pendidikan	827462	BUKU AGAMA	Agama Kristen	31/12/2019	Agama Kristen	18.600,00
26	Dinas Pendidikan	123757	BUKU UMUM	Ilmu Pengetahuan Umum	31/12/2013	PKN	43.000,00

Penilaian Aset tetap lainnya di atas dilakukan dengan berpedoman pada harga barang yang sejenis di OPD yang sama. Setelah dilakukan penilaian maka barang-barang tersebut dikelompokkan ke Aset Ekstrakomtabel karena nilainya di bawah batas minimum kapitalisasi.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

**Tahun 2024
(Rp)**

58.959.974.140,91

**Tahun 2023
(Rp)**

51.301.620.734,61

Saldo aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.959.974.140,91 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 69.

Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	8.987.761.349,30	26.599.262.801,00
2	Jalan	43.960.476.966,75	19.870.562.260,75
3	Jembatan	3.673.731.133,00	3.673.731.133,00
4	Irigasi	0,00	0,00
5	Instalasi	122.014.312,86	122.014.312,86
6	Jaringan	2.215.990.379,00	1.036.050.227,00
Jumlah		58.959.974.140,91	51.301.620.734,61

Mutasi saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 70. Rekapitulasi Nilai Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

Saldo Per 31 Desember 2023	51.301.620.734,61
Penambahan :	
Reklas Antar Kelompok	1.068.704.257,00
Reklasifikasi dr Belanja BJ/KIB A/B/C/D/E	30.680.632.477,30
Jumlah Penambahan	31.749.336.734,30
Pengurangan :	
Reklasifikasi ke JIJ	20.923.558.324,00
Pengembalian Uang Muka	3.167.425.004,00
Jumlah Pengurangan	24.090.983.328,00
Saldo Per 31 Desember 2024	58.959.974.140,91

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per OPD dapat dilihat pada lampiran V. 19a, V. 19b.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah pekerjaan kontrak konstruksi yang sedang dalam proses pengerjaan yang sampai per tanggal pelaporan belum selesai dan siap pakai. Pekerjaan yang masuk dalam kategori konstruksi dalam pengerjaan dilakukan dengan kontrak konstruksi dan swakelola. Biaya konstruksi dalam pengerjaan meliputi pembayaran termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor atau tim swakelola sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap apabila konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Dijelaskan bahwa terdapat BMD dalam KDP
- Nilai KDP adalah sebesar nilai pembayaran atas progres atau kemajuan pekerjaan dan kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima namun belum dibayar seluruhnya.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	(1.476.257.498.936,00)	(1.384.688.125.018,17)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.476.257.498.936,00) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 71. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(251.837.090.479,90)	(210.502.153.282,17)
2	Gedung dan Bangunan	(258.971.018.582,00)	(237.537.816.589,07)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(965.418.309.874,10)	(936.617.075.146,93)
4	Aset Tetap Lainnya	(31.080.000,00)	(31.080.000,00)
	Jumlah	(1.476.257.498.936,00)	(1.384.688.125.018,17)

Mutasi saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 72. Mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2024	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan Dan Mesin	210.502.153.282,17	(3.163.145.748,91)	44.498.082.946,64	251.837.090.479,90
2	Gedung dan Bangunan	237.537.816.589,07	(1.502.332.522,07)	22.935.534.515,00	258.971.018.582,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	936.617.075.146,93	(12.461.937.602,93)	41.263.172.330,10	965.418.309.874,10
4	Aset Tetap Lainnya	31.080.000,00	0,00	0,00	31.080.000,00
	Jumlah	1.384.688.125.018,17	(17.127.415.873,91)	108.696.789.791,74	1.476.257.498.936,00

- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan dicatat pada akun Beban Penyusutan dengan lawan akun Akumulasi Penyusutan.
- Penyusutan Barang Milik Daerah dilakukan dengan metode garis lurus, dengan formula yaitu nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

manfaat. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara tahunan sejak aset tetap diperoleh hingga berakhirnya masa manfaat.

- Perhitungan ulang akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, hal ini dilakukan karena kurang cermat melakukan perhitungan yang sebagian dihitung secara manual, lalu disesuaikan di dalam sistem aplikasi dan penginputan kembali aset tetap dalam sistem yang sifatnya dikapitalisasi seperti gedung dan jalan. Selain itu adanya penghapusan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan aset tetap karena pemindahtanganan. Atas selisih perhitungan ulang ini, maka dilakukan koreksi yaitu dengan pembetulan akun akumulasi penyusutan dengan lawan akun koreksi ekuitas.

5.3.1.4 Aset Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	31.202.108.239,27	31.351.921.262,85

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.202.108.239,27 dibandingkan dengan saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.351.921.262,85 terjadi penurunan sebesar Rp149.813.023,58 Rekapitulasi mutasi aset lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 73. Rekapitulasi Mutasi Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12.009.138.677,74	1.371.775.611,21	548.356.208,00	12.832.558.080,95
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	551.546.900,00	442.875.700,00	0,00	994.422.600,00
3	Aset Lain-lain	16.428.255.585,11	9.416.020.020,62	8.088.374.507,41	17.755.901.098,32
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(187.470.900)	0,00	193.302.640,00	(380.773.540,00)
5	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF) - Pokok DBH/DAU	2.550.451.000,00	0,00	2.550.451.000,00	0,00
	Jumlah	31.351.921.262,85	11.230.671.331,83	11.380.484.355,41	31.202.108.239,27

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	12.832.558.080,95	12.009.138.677,74

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Saldo Tuntutan Kerugian Daerah per



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

31 Desember 2024 sebesar Rp12.832.558.080,95 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.009.138.677,74 terjadi kenaikan sebesar Rp823.419.403,21 atau 6,85%.

Tabel 5. 74. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Tahun	Sisa Per 31 Desember 2023 (Rp)	Tindak Lanjut		Koreksi Lebih/ Kurang Saji (Rp)	Sisa Per 31 Desember 2024 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan		
1	2005-2006	1.930.629.393,00	0,00	0,00	0,00	1.930.629.393,00
2	2016	4.610.785.046,44	0,00	511.156.208,00	0,00	4.099.628.838,44
3	2017	754.195.544,14	0,00	0,00	0,00	754.195.544,14
4	2018	3.051.066.181,28	0,00	0,00	0,00	3.051.066.181,28
5	2006-2014 (aset lain-lain)	1.662.462.512,88	0,00	0,00	0,00	1.662.462.512,88
6	2022	0,00	473.185.414,29	37.200.000,00	0,00	435.985.414,29
7	2023	0,00	121.874.496,92	0,00	0,00	121.874.496,92
8	fisik Jalan tidak terealisasi di Dinas PUPR 2024	0,00	776.715.700,00	0,00	0,00	776.715.700,00
Jumlah		12.009.138.677,74	1.371.775.611,21	548.356.208,00	0,00	12.832.558.080,95

Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada lampiran V.20a, V.20b, V.20c, V.20d, V20e, V20f, V20g.

Dijelaskan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

1. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2005-2007 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 75.
Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2005-2007

No.	Nama	Saldo Per 31 Desember 2024	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember		Keterangan
			Disetor (Rp)	Sisa Yang Belum Dibayar	
1	Hotmaria Tampubolon	271.350.863,00	-	271.350.863,00	Sekretariat Daerah (BUD periode 2004 dan 2005)
2	Selamat Manao	49.991.383,00	-	49.991.383,00	Sekretariat Daerah (BUD periode 1 Januari 2006 s.d. 31 Juni 2006)
3	Saferinus Garamba	964.944.263,00	-	964.944.263,00	Sekretariat Daerah (Bendahara Pengeluaran periode 2006)
4	Gooziduhu Telaumbanua	644.342.884,00	-	644.342.884,00	Kuasa BUD tahun 2007
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		1.930.629.393,00	-	1.930.629.393,00	

2. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 76. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2016

No. Urut	Nama OPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Tindak Lanjut 01 Januari s.d 31		Keterangan
			Disetor (Rp)	Sisa Yang Belum Dibayar	
1	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	284.438.999,84	1.600.000,00	282.838.999,84	Pegawai
2	Dinas Pendidikan	21.320.000,00	-	21.320.000,00	Pegawai
3	Dinas Pendidikan	1.174.471.510,00	3.000.000,00	1.171.471.510,00	Bendahara Pengeluaran
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.540.481.060,70	-	1.540.481.060,70	Pihak Ketiga
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	509.768.874,19	-	509.768.874,19	Pihak Ketiga
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.318.781,88	3.985.394,00	299.333.387,88	KSM
7	Sekretariat Daerah	10.121.456,00	-	10.121.456,00	Pegawai
8	Sekretariat Daerah	560.000.000,00	498.796.514,00	61.203.486,00	Bendahara Pengeluaran
9	Dinas Lingkungan Hidup	8.611.997,00	-	8.611.997,00	Pegawai
10	Sekretariat DPRD	52.542.169,00	-	52.542.169,00	DPRD / Pegawai
11	Sekretariat DPRD	8.050.000,00	-	8.050.000,00	PPTK
12	Dinas Kesehatan	133.885.897,83	-	133.885.897,83	Pihak Ketiga
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.774.300,00	3.774.300,00	-	Bendahara Pengeluaran
Total Dikembalikan ke Kas Daerah		4.610.785.046,44	511.156.208,00	4.099.628.838,44	-

3. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 5. 77. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2017

No.	Nama OPD	Saldo Per 31 Desember 2023	Tindak Lanjut 01 Januari s.d 31		Keterangan
			Disetor (Rp)	Sisa Yang Belum Dibayar	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.893.244,14	-	303.893.244,14	Pihak Ketiga
2	Dinas Kesehatan	349.795.300,00	-	349.795.300,00	Bendahara Pengeluaran
3	Dinas Kesehatan	100.507.000,00	-	100.507.000,00	Pihak Ketiga
Total Pengembalian ke Kas Daerah		754.195.544,14	-	754.195.544,14	

4. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 78. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2018

No. Urut	Nama OPD	Pihak Yang Bertanggungjawab	Saldo Per 31 Desember 2023	Tindak Lanjut 01 Januari s.d 31 Desember 2024		Keterangan
				Disetor (Rp)	Sisa Yang Belum Dibayar	
1	Sekretariat Daerah	CV. TIMBUL BARU JAYA (TBJ)	68.822.966,98	-	68.822.966,98	Pihak Ketiga
2	Dinas PUPR	PT. NETRALINDO JAYA MANDIRI (NJM)	(0,00)	-	(0,00)	Pihak Ketiga
3	Dinas PUPR	CV. MITRA UTAMA (MU)	35.126.076,65	-	35.126.076,65	Pihak Ketiga
4	Dinas PUPR	PT. GILANG PRATAMA JAYA (GPJ)	-	-	-	Pihak Ketiga
5	Dinas PUPR	CV. PRIMA JAYA (PJ)	6.756.894,40	-	6.756.894,40	Pihak Ketiga
6	Dinas PUPR	PT. ARNELINDO HAGA WISESA (AHW)	(0,00)	-	(0,00)	Pihak Ketiga
7	Dinas PUPR	CV. VEGATON (V)	169.519.735,08	-	169.519.735,08	Pihak Ketiga
8	Dinas PUPR	PT. HARIMAU IRAONO HUNA (HIH)	-	-	-	Pihak Ketiga
9	Dinas PUPR	CV. MARVEL JAYA (MJ)	25.967.113,59	-	25.967.113,59	Pihak Ketiga
10	Dinas PUPR	CV. IHAKA (I)	92.413.233,21	-	92.413.233,21	Pihak Ketiga
11	Dinas PUPR	PT. MESTIKA AGUNG RAYA (MAR)	0,00	-	0,00	Pihak Ketiga
12	Dinas PUPR	CV. WELDY (W)	(0,00)	-	(0,00)	Pihak Ketiga
13	Dinas PUPR	CV. GEWA (G)	43.601.096,54	-	43.601.096,54	Pihak Ketiga
14	Dinas PUPR	CV. USAHA BERSAMA MANDIRI (UBM)	20.353.011,84	-	20.353.011,84	Pihak Ketiga
15	Dinas PUPR	CV. PUTRA GUNUNG BATU (PGB)	(0,00)	-	(0,00)	Pihak Ketiga
16	Dinas Kesehatan	NISWA OPRATIWI DUHA (BENDAHARA PENGELUARAN TA. 2018)	2.588.506.053,00	-	2.588.506.053,00	Bendahara Pengeluaran / Berdasarkan Surat BPK RI Nomor : 59/S/I/12/2020, tgl 23 Desember 2020
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH			3.051.066.181,28	-	3.051.066.181,29	

Tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2024 tidak ada mengalami pengurangan.

- Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2006-2014 (aset lain-lain) dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 79. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2006-2014

No.	Nama	Saldo per 31 Desember 2023	Koreksi Pengurangan / Penambahan	Tindakan lanjut s.d. 31 Desember		Keterangan
				Disetor (Rp)	Sisa Yang Belum Dibayar	
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.339.205.562,88	-	-	1.339.205.562,88	
1.1.	Sekretariat Daerah Tahun 2006	334.307.291,88	-	-	334.307.291,88	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.2.	Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.3.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2007	158.623.396,00	-	-	158.623.396,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.4.	Sekretariat DPRD Tahun 2007	3.375.825,00	-	-	3.375.825,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.5.	Sekretariat DPRD Tahun 2009	164.000.000,00	-	-	164.000.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.6.	Sekretariat DPRD Tahun 2011	47.976.500,00	-	-	47.976.500,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013	158.300,00	-	-	158.300,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.8.	Kantor Camat Fanayama Tahun 2014	3.710.000,00	-	-	3.710.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.9.	Dinas Perhubungan Tahun 2013	25.154.250,00	-	-	25.154.250,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
1.10.	Dinas Pendidikan Tahun 2013	1.900.000,00	-	-	1.900.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	308.256.950,00	-	-	308.256.950,00	
2.1.	Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Tahun 2013	306.093.950,00	-	-	306.093.950,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
2.2.	Dinas PSDA Tahun 2012	2.163.000,00	-	-	2.163.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
3.	TP/TGR yang ada SKTJM	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	Bendahara Pengeluaran - Belum ada SKTJM
	Reklasifikasi Aset Lain-Lain Kas di Bendahara pada LKPD Audited TA. 2020 ke Tagihan Jangka Panjang - Kas di Bendahara Pengeluaran di beberapa OPD	1.662.462.512,88	-	-	1.662.462.512,88	

6. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 79.a . Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022

NO. URUT	NAMA OPD	Lebih Bayar (Tidak Sesuai Ketentuan / Kerugian Negara/Daerah)	TINDAKLANJUT 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024		KETERANGAN
			DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	325.487.814,29	37.200.000,00	288.287.814,29	Pihak Ketiga
2	DINAS PENDIDIKAN	147.697.600,00	-	147.697.600,00	Kepala Sekolah SDN.075105 Hilizamurogo
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		473.185.414,29	37.200.000,00	435.985.414,29	

7. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 79.b . Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023

NO. URUT	NAMA OPD	Lebih Bayar (Tidak Sesuai Ketentuan / Kerugian Negara/Daerah)	TINDAKLANJUT 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2024		KETERANGAN
			DISETOR (Rp)	SISA YANG BELUM DIBAYAR	
1	BPKPD / MPPKD	23.085.200,00	-	23.085.200,00	Temuan kepada Pegawai Mutasi/Pindah Luar Kabupaten Nias Selatan
2	SEKRETARIAT DPRD	8.850.000,00	-	8.850.000,00	Anggota DPRD yang sudah meninggal
3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	89.939.296,92	-	89.939.296,92	Pihak Ketiga an. CV. Saonigeho
TOTAL PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH		121.874.496,92	-	121.874.496,92	

8. Kelebihan Pencairan oleh bendahara pengeluaran di dinas PUTR Tahun Anggaran 2024

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp776.715.700,00 merupakan kelebihan pencairan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PUTR tahun 2024 atas pencairan belanja modal jalan, irigasi, jaringan secara swakelola Tahun 2024 sebesar Rp940.000.000,00 dimana telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 25 Februari s.d 08 April 2025 sebesar Rp163.284.300,00 sehingga tersisa sebesar Rp776.715.700,00. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah dan Inspektur telah melakukan beberapa upaya berupa:

- a. Melakukan pemanggilan kepada bendahara pengeluaran Dinas PUTR Tahun 2024 sebanyak dua kali melalui pemanggilan pertama pada tanggal 16 April 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Daerah Nomor 700/8407/ITDA/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dan pemanggilan kedua pada tanggal 7 Mei 2025 sesuai surat undangan Sekretaris Daerah Nomor 700/7901/ITDA/V/2025 tanggal 6 Mei 2025;
- b. Melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menjalin komitmen pengembalian kelebihan pencairan atau menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) beserta jaminannya sesuai nilai kelebihan pencairan; dan
- c. Penandatanganan SKTJM oleh bendahara pengeluaran Dinas PUTR Tahun 2024 pada tanggal 20 Mei 2025 dengan komitmen pembayaran secara cicilan sebesar Rp32.363.155,00 per bulan melalui pemotongan gaji dan penghasilan lainnya serta jaminan berupa sertifikat kepemilikan tanah.

Selain itu pada saat pemeriksaan dilakukan, diketahui kondisi kelebihan pencairan tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nias Selatan pada tahap penyelidikan pada tanggal 20 Maret 2025 dan menjadi tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Print-02/L.2.30/Fd.1/03/2025 tanggal 27 Maret 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	994.422.600,00	551.546.900,00

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp994.422.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 80. Rekapitulasi Nilai Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Pertambahan Tahun 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Lisensi dan Franchise	14.909.400,00	0,00	14.909.400,00
2	Software	536.637.500,00	244.075.000,00	780.712.500,00
3	Kajian	0,00	198.800.700,00	198.800.700,00
Jumlah		551.546.900,00	442.875.700,00	994.422.600,00

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat dilihat pada lampiran V.21

Pertambahan Aset tidak berwujud yakni Software dan kajian Rp 442.875.700,00 terdiri dari Software Rp244.075.000,00 dan Kajian sebesar Rp198.800.700,00.

5.3.1.4.3 Aset Lain-Lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	17.755.901.098,32	16.428.255.585,11

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.755.901.098,32 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 81. Rekapitulasi Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2024

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	1.077.780.000,00	0,00	0,00	1.077.780.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.940.520.292,87	8.072.221.280,16	7.640.538.080,01	3.372.203.493,02
2	Gedung dan Bangunan	7.737.441.019,62	1.123.029.374,41	447.836.427,40	8.412.633.966,63
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.912.349.010,57	205.919.366,05	0,00	2.118.268.376,62
4	Aset Tetap Lainnya	2.760.165.262,05	14.850.000,00	0,00	2.775.015.262,05
Jumlah		16.428.255.585,11	9.416.020.020,62	8.088.374.507,41	17.755.901.098,32

Rincian mutasi saldo aset lain-lain untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran V.22



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Mempedomani PSAP Nomor 07 paragraf 78 yang menyatakan bahwa aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, menyatakan bahwa aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain menurut nilai tercatatnya.
- Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan. Dalam Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Informasi atas aset lain-lain ini antara lain aset yang tidak ada atau tidak diketahui, aset yang telah dihibahkan namun masih dicatat, tidak memenuhi kriteria aset tetap, aset yang secara pemanfaatan dan pemeliharannya telah diserahkan kepada kelompok masyarakat, aset yang telah hancur fisiknya karena kondisi alam.
- Terdapat penambahan aset lain-lain sebesar Rp9.416.020.020,62 yang bersumber dari hasil inventarisasi barang rusak berat, hilang dan tidak ditemukan.

5.3.1.4.4 Aset Tetap Ekstrakomtabel	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	103.687.340.642,89	96.533.554.221,89

Aset Tetap Ekstrakomtabel per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.687.340.642,89. Aset tetap Ekstrakomptabel merupakan aset peralatan dan mesin yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Perubahannya Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 39 Tahun 2023. Rincian saldo aset tetap Ekstrakomptabel untuk masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 82. Rekapitulasi Mutasi Nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	96.533.554.221,89
Penambahan	Rp	7.157.730.604,00
Pengurangan	Rp	3.944.183,00
Saldo Awal 31 Desember 2024	Rp	103.687.340.642,89

Rincian nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel dapat dilihat pada lampiran V.23.

Aset Tetap Bernilai Sejarah pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 paragraf 65 menyatakan bahwa beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah (*heritage assets*) dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga memiliki aset tetap bernilai sejarah berupa batu megalitikum sebanyak 37 buah yang berada pada 5 (lima) Kecamatan. Terhadap aset bersejarah tidak terdapat nilai harga wajar. Lokasi aset bersejarah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 83. Lokasi Aset Tetap Bernilai Sejarah

No	Jenis Benda	Jumlah	Lokasi
1	Batu Megalit	25	Kecamatan Teluk Dalam, Onolalu dan Maniamolo
2	Batu Megalit	5	Kecamatan Siduaõri
3	Batu Megalit	3	Kecamatan Idanõtae
4	Batu Megalit	2	Kecamatan Huruna
5	Batu Megalit	2	Kecamatan Hilimegai Desa Togizita
	Jumlah	37	

Beberapa foto batu megalit yang berada di Kabupaten Nias Selatan ditampilkan pada gambar di berikut ini :

- Desa Olayama Kecamatan Huruna





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

- Desa Lahusa Satua Kecamatan Idanōtae



5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>(380.773.540,00)</u>	<u>(187.470.900,00)</u>

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp380.773.540,00) dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar (Rp187.470.900,00).

5.3.1.4.5 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>2.550.451.000,00</u>

Dijelaskan bahwa Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) - Pokok Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 sebesar Rp2.550.451.000,00 dicatat berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-54/PK/PK.2/2024 tentang Penyaluran Dana Transfer TDF ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2024. TDF tersebut sudah disalurkan ke RKUD pada tanggal 25 Maret 2024.

5.3.2. Kewajiban	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>10.545.172.614,95</u>	<u>29.490.876.248,89</u>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.545.172.614,95 yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.3.2.1. Utang PFK	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>168.782.617,88</u>	<u>63.822.173,82</u>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Iuran Taperum. Selain itu juga termasuk potongan BPJS, dimana pada akhir periode akuntansi belum disetorkan. Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.782.617,88 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 84. Rekapitulasi Utang PFK

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang PFK PPh 21 Tahun 2015 (Dinas Pendidikan)	149.820.233,00	0,00
2	Utang PFK PPh 22 Tahun 2013 (Dinas PUPR)	10.575.230,00	0,00
3	Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) TA. 2020 sebesar 1%	8.387.154,88	63.822.173,82
Jumlah		168.782.617,88	63.822.173,82

Dijelaskan Utang PFK:

1. Utang PFK PPh 21 tahun 2015 pada Dinas Pendidikan merupakan jurnal reklasifikasi dari akun koreksi ekuitas sebesar Rp149.820.233,00;
2. Utang PFK PPh 22 tahun 2013 pada Dinas PUPR merupakan jurnal reklasifikasi dari akun koreksi ekuitas sebesar Rp10.575.230,00;
3. Iuran Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun anggaran 2020 sebesar 1% bahwa Berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan pemerintah Kabupaten Nias Selatan perhitungan sisa kekurangan 1% dari tambahan penghasilan Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 Nomor:167/BA/I-13/0325, Nomor:900/1028/BPKPD/2025 dan Nomor:900/270-I/DISDIK/2025 sebesar Rp8.387.154,88.

5.3.2.2 Utang Belanja	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.355.201.315,00</u>	<u>8.285.249.265,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo utang belanja 31 Desember 2024 sebesar Rp1.355.201.315,00 merupakan utang belanja barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasannya belum dilakukan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tabel 5. 85. Rekapitulasi Utang Belanja

No	OPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Dinas Perhubungan	0,00	58.938.000,00
2	Dinas Kesehatan	93.132.480,00	752.735.080,00
3	Dinas PUPR	732.014.047,00	7.093.326.504,00
4	BPKPD	530.054.788,00	380.249.681,00
Jumlah		1.355.201.315,00	8.285.249.265,00

Rincian utang belanja dapat dilihat pada lampiran V.24

5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>9.021.188.682,07</u>	<u>21.141.804.810,07</u>

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.021.188.682,07. Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 yang terdiri dari utang belanja berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor 700/01/LHP-ITKAB/2018 tanggal 20 November 2018 atas hasil verifikasi bahwa utang belanja tahun 2014 dan utang belanja tahun 2015. Utang jangka pendek lainnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 86. Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Jenis Utang	Sisa Utang per 31 Desember 2023	Penghapusan Utang pada Tahun 2024	Penambahan Utang TA.2024	Sisa Utang per 31 Desember 2024
1	Utang Belanja (SP2D Tahun 2014)	1.523.864.370,00	1.207.290.745,00	0,00	316.573.625,00
2	Utang Belanja (SP2D Tahun 2015)	19.464.838.629,00	12.114.549.383,00	0,00	7.350.289.246,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas PUPR Tahun 2021	153.101.811,07	0,00	0,00	153.101.811,07
4	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (ADD) pada BPKPD	0,00	0,00	1.201.224.000,00	1.201.224.000,00
TOTAL		21.141.804.810,07	13.321.840.128,00	1.201.224.000,00	9.021.188.682,07

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran V.25.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Berdasarkan keputusan Bupati Nias Selatan Nomor:100.3.3.2/559/2024 tentang Penghapusan Hutang Jangka Pendek Lainnya atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Outstanding tahun 2014 dan tahun 2015 di Kabupaten Nias Selatan dengan penghapusan sebanyak dua ratus satu (201) SP2D pada 12 OPD dengan nilai sebesar Rp13.321.840.128,00. Utang belanja bantuan keuangan berdasarkan hasil Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan nomor 700.1.2.1/11/ITDA/II/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Laporan Kasil Reviu (LHR) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 belum dibayarkan sebesar Rp.1.201.224.000,00.

5.3.3. Ekuitas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.225.509.774.939,00</u>	<u>2.064.090.842.833,36</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.225.509.774.939,00.

5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.225.509.774.939,00</u>	<u>2.064.090.842.833,36</u>

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo akhir ekuitas pada TA.2024 adalah sebesar Rp2.225.509.774.939,00 yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.064.090.842.833,36 Surplus/Defisit LO sebesar Rp148.615.183.796,89, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar Rp12.803.748.308,75 yaitu Koreksi Ekuitas Lainnya.

5.4.2 Ekuitas Awal	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>2.064.090.842.833,36</u>	<u>2.116.176.437.056,97</u>

Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp2.064.090.842.833,36 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.4.3	Surplus/Defisit– LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>148.615.183.796,89</u>	<u>234.084.489.870,37</u>

Surplus-LO sebesar Rp148.615.183.796,89 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

5.4.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>12.803.748.308,75</u>	<u>(286.170.084.093,98)</u>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar Rp12.803.748.308,75 merupakan nilai akun koreksi ekuitas lainnya. Koreksi ekuitas lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 87. Rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kas Lainnya	(2.379.538,00)
2	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.008.270.792,00
3	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	4.493,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(271.200.000,00)
5	Peralatan dan Mesin	(7.740.449.293,52)
6	Gedung dan bangunan	(5.015.730.994,36)
7	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(22,84)
8	Akumulasi Penyusutan Aset	16.674.854.484,32
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	46.703.703,21
10	Aset lain-lain	(5.770.343.620,00)
11	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	55.435.018,94
12	Utang PFK	(160.395.463,00)
13	Utang Belanja	14.027.785.922,00
14	Koreksi Persediaan	(48.807.173)
	TOTAL	12.803.748.308,75

5.4.5.	Ekuitas Akhir	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>2.225.509.774.939,00</u>	<u>2.064.090.842.833,36</u>

Ekuitas Akhir sebesar Rp2.225.509.774.939,00 adalah merupakan ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh Surplus-LO sebesar Rp148.615.183.796,89

5.5.1	Pendapatan-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>1.163.823.500.055,32</u>	<u>1.147.507.779.661,21</u>

Jumlah pendapatan-LO selama tahun 2024 sebesar Rp1.163.823.500.055,32. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp32.601.612.973,32, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.117.355.434.069,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp13.866.453.013,00.

5.5.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<u>32.601.612.973,32</u>	<u>37.978.877.383,21</u>

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.601.612.973,32. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO TA. 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 88. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel- LO	378.902.909,00	526.416.000,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya -LO	5.196.367.452,80	4.653.912.275,40
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya- LO	278.161.050,00	113.202.000,00
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya –LO	31.735.000,00	61.625.000,00
5	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ ideotron/ Megatron-LO	767.462.273,98	1.012.399.882,88
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	3.830.801.953,00	3.670.881.920,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya- LO	3.366.001.081,35	3.697.662.456,82
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)- LO	1.083.904.908,00	85.218.385,35
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak- LO	2.800.000,00	10.200.000,00
10	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	193.324.850,00	174.486.758,00
11	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan- LO	37.666.500,00	27.736.500,00
12	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	55.281.002,00	0,00
13	Retribusi Pelayanan Pasar- LO	63.065.000,00	61.317.000,00
14	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO	0,00	107.500.000,00
15	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.250.000,00	0,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- LO	28.290.298,00	1.132.788,00
17	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD- LO	6.066.435.843,00	4.815.589.663,00
18	Hasil Penjualan Alat Angkutan- LO	125.763.000,00	0,00
19	Jasa Giro- LO	3.778.844.938,00	2.139.679.683,20
20	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	-604.565,76
21	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain- LO	2.729.348.879,20	3.587.826.571,53
22	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	606.401.309,50	248.206.296,00
23	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	0,00	30.240.000,00
24	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	5.616.000,00
25	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	5.616.000,00
26	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	0,00	101.160,00
27	Pendapatan Denda PBBP2 – LO	56.934.245,00	237.150.843,79
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.046.444.325,00	151.095.070,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	105.430.700,00	0,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO	1.959.831.052,49	0,00
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	712.164.403,00	0,00
32	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO	0,00	12.554.669.695,00
Jumlah		32.601.612.973,32	37.978.877.383,21



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.2.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>15.129.461.478,13</u>	<u>14.006.004.678,45</u>

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.129.461.478,13. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 89. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	Pendapatan Pajak-LO Per 31 Desember 2024 (Rp)	Pendapatan Pajak-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	378.902.909,00	526.416.000,00
2	Pajak Restoran	5.474.528.502,80	4.767.114.275,40
3	Pajak Hiburan	31.735.000,00	61.625.000,00
4	Pajak Papan Reklame/Bill Board	767.462.273,98	1.012.399.882,88
5	Pajak Penerangan Jalan	3.830.801.953,00	3.670.881.920,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.366.001.081,35	3.697.662.456,82
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran	1.083.904.908,00	85.218.385,35
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	196.124.850,00	184.686.758,00
JUMLAH		15.129.461.478,13	14.006.004.678,45

5.5.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>284.552.800,00</u>	<u>197.686.288,00</u>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp284.552.800,00. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5. 90. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	37.666.500,00	27.736.500,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	55.281.002,00	0,00
3	Retribusi Pelataran	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Retribusi Los	59.065.000,00	49.317.000,00
5	Retribusi Kios	0,00	8.000.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.250.000,00	30.250.000,00
7	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	77.250.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	28.290.298,00	1.132.788,00
JUMLAH		284.552.800,00	197.686.288,00

5.5.2.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>6.066.435.843,00</u>	<u>4.815.589.663,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.066.435.843,00. Sumber Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 91. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah – LO	6.066.435.843,00	4.815.589.663,00
Jumlah		6.066.435.843,00	4.815.589.663,00

5.5.2.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
<u>11.121.162.852,19</u>	<u>18.959.596.753,76</u>

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.121.162.852,19. Rincian realisasi Lain- Lain PAD yang Sah- LO tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 92. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-LO	125.763.000,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah – LO	3.778.830.182,00	2.130.013.257,00
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	14.756,00	9.666.426,20
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat lain – LO	2.729.348.879,20	3.587.826.571,53
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain – LO	606.401.309,50	248.206.296,00
6	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	30.240.000,00
7	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	5.616.000,00
8	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	5.616.000,00
9	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	101.160,00
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	0,00	237.150.843,79
11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	56.934.245,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa	1.046.444.325,00	151.095.070,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	105.430.700,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	1.959.831.052,49	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	712.164.403,00	0,00
16	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	12.554.669.695,00
17	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	-604.565,76
Jumlah		11.121.162.852,19	18.959.596.753,76

5.5.3. Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.117.355.434.069,00	1.109.528.902.278,00

Jumlah Pendapatan Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.117.355.434.069,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 93. Rincian Pendapatan Transfer– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.066.947.696.101,00	1.057.781.610.418,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	50.407.737.968,00	51.747.291.860,00
Jumlah		1.117.355.434.069,00	1.109.528.902.278,00

5.5.3.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	1.066.947.696.101,00	1.057.781.610.418,00

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.066.947.696.101,00. Rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 5. 94. Rincian Pendapatan Dana Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat – LO**

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.260.834.648,00	7.983.146.010,00
	DBH PBB - LO	3.731.752.809,00	2.828.502.460,00
	DBH PPh Pasal 21 - LO	4.872.072.839,00	4.529.501.290,00
	DBH PPh Pasal 25 & 29 Wajib Pajak Orang Pribadi - LO	363.519.000,00	429.781.000,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	293.490.000,00	195.361.260,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17.288.136.456,00	20.021.643.050,00
	DBH SDA Minyak Bumi - LO	289.553.628,00	240.484.550,00
	DBH SDA Gas Bumi - LO	5.981.000,00	298.150.650,00
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi - LO	616.085.164,00	2.036.330.800,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent - LO	0,00	0,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty - LO	1.015.595.100,00	1.167.951.600,00
	DBH SDA Kehutanan-PSDH - LO	938.779.564,00	12.721.874.000,00
	DBH SDA Kehutanan-DR - LO	(680.750.000)	0,00
	DBH SDA Perikanan	4.568.330.000,00	3.556.851.450,00
	DBH Sawit-LO	10.534.562.000,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum	683.537.602.435,00	650.139.402.200,00
	Dana Alokasi Umum	683.537.602.435,00	650.139.402.200,00
4	Dana Alokasi Khusus	356.861.122.562,00	379.637.419.158,00
	DAK Fisik Bidang Pendidikan	0,00	32.319.729.143,00
	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	1.718.242.669,00	44.683.004.706,00
	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Pariwisata	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LO	0,00	32.491.835.560,00
	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan-Jalan - LO	19.294.681.403,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Air Minum- Penugasan	14.121.505.600,00	13.706.912.600,00
	DAK Fisik Sanitasi- Penugasan Bidang - LO	12.668.114.500,00	12.898.147.150,00
	DAK Fisik Bidang Irigasi- Penugasan Bidang - LO	0,00	0,00
	DAK Fisik Bidang Transportasi dan Perdesaan - LO	7.292.851.728,00	5.392.684.000,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	0,00	11.434.835.640,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	267.750.191,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD-LO	42.568.323.319,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP-LO	25.858.573.014,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	17.307.044.628,00	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler - LO	59.802.339.391,00	63.569.169.150,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja - LO	2.177.500.000,00	2.890.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD - LO	27.887.402.000,00	25.401.011.600,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD - LO	2.592.814.000,00	2.147.545.914,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD - LO	51.832.810.000,00	34.976.974.000,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD - LO	192.172.149,00	5.770.885.400,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan - LO	0,00	641.880.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK - LO	0,00	25.710.848.561,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	36.333.271.642,00	37.387.035.000,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM - LO	482.148.164,00	226.692.388,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan - LO	0,00	956.616.336,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal - LO	0,00	760.985.000,00
	DAK Non Fisik-BOKB- KB - LO	8.600.759.800,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - LO	779.482.090,00	199.271.010,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	4.999.794.274,00	0,00
	Pendapatan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) - Pokok DBH/DAU - LO	0,00	2.550.451.000,00
	DID-LO	0,00	23.520.905.000,00
	Insentif Fiskal-LO	20.083.542.000,00	
	Jumlah	1.066.947.696.101,00	1.057.781.610.418,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.3.2 Pendapatan	Tahun 2024	Tahun 2023
Transfer	(Rp)	(Rp)
Pemerintah Antar Daerah- LO	50.407.737.968,00	51.747.291.860,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.407.737.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	15.427.248.834,00	26.884.319.789,00
	Pajak Kendaraan Bermotor	5.583.049.142,00	10.369.404.068,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.506.845.758,00	7.027.700.842,00
	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.080.379.141,00	8.624.445.153,00
	Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Umum	256.974.793,00	862.769.726,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	22.998.341.211,00	19.371.192.017,00
	Pajak Rokok	22.998.341.211,00	19.371.192.017,00
3	Bantuan Keuangan Khusus- LO	11.982.147.923,00	5.491.780.054,00
	Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi - LO	11.982.147.923,00	5.491.780.054,00
Jumlah		50.407.737.968,00	51.747.291.860,00

5.5.4 Lain-Lain	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Daerah	(Rp)	(Rp)
yang Sah- LO	13.866.453.013,00	0,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.866.453.013,00. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 96. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	124.752.728,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan -LO	13.741.700.285,00	0,00
Jumlah		13.866.453.013,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Pendapatan Hibah –LO merupakan pendapatan yang diakui berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar dari Gedung Alokon Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Nomor:005/KB.103/J.3/2024 tanggal 31 Januari 2024, Nomor:049/KB.104/J.3/2024 tanggal 20 Mei 2024, Nomor:090/KB.103/J.3/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor:160/KB.103/J.3/2024 tanggal 17 Oktober 2024 ada penerimaan Alokon sebesar Rp.472.604.820, pemakaian sebesar Rp396.659.265 dan sisa saldo akhir alokon tahun 2024 sebesar Rp124.752.728,00.

5.5.5. Beban	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	1.015.208.316.258,43	913.423.289.790,84

Jumlah beban operasional Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.015.208.316.258,43.

5.5.5.1 Beban Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	455.849.491.693,00	388.339.639.884,00

Beban Pegawai merupakan beban untuk pegawai, baik yang terkait kegiatan secara langsung maupun tidak terkait dengan kegiatan. Beban pegawai diterima oleh aparatur Pemerintah, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Beban pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, honorarium kegiatan. Realisasi beban pegawai selama TA.2024 sebesar Rp455.849.491.693,00. Rincian beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 97. Beban Pegawai

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	290.612.514.711,00	247.598.854.493,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	37.570.021.731,00	32.024.434.503,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LO	84.590.150.943,00	68.183.220.678,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	16.776.809.609,00	16.786.584.584,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	166.592.604,00	166.935.746,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	310.337.095,00	423.559.380,00
7	Beban Pegawai BOS – LO	25.823.065.000,00	23.156.050.500,00
Jumlah		455.849.491.693,00	388.339.639.884,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.5.2. Beban Barang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	79.542.873.775,00	115.820.622.720,00

Beban Persediaan selama TA.2024 sebesar Rp79.542.873.775,00. Rincian Beban Persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.98. Beban Barang

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	246.418.259,00	163.193.076,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.693.720,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.214.473.161,00	2.647.825.392,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	1.011.267.800,00	161.322.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	32.203.440,00	3.235.774.220,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	2.120.410.600,00	8.113.216.367,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.929.950,00	0,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.060.405.093,00	14.715.978.091,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.774.973.188,00	8.354.416.579,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	695.524.700,00	691.701.500,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.725.100,00	0,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	579.200,00	1.304.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	819.896.650,00	667.045.550,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	189.693.391,00	400.099.200,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	49.950.000,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	115.183.890,00	138.086.025,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	156.323.557,00	1.005.355.549,00
18	Beban Obat-Obatan-Obat	9.747.229.141,00	4.003.691.636,00
19	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	5.389.997.204,00
20	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.591.556.902,00	32.749.710.040,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	96.180.000,00	196.374.000,00
22	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.792.604.244,00	25.277.709.929,00
23	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.080.884.800,00	4.674.627.977,00
24	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.200.000,00	0,00
25	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	29.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
26	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	1.580.407.590,00
27	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.186.900,00	134.737.350,00
28	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	36.637.200,00	0,00
29	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	182.193.420,00	561.412.448,00
30	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	136.477.330,00	197.853.320,00
31	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.885.000,00	0,00
32	Beban Pakaian KORPRI	11.628.800,00	217.627.482,00
33	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	86.055.960,00
34	Beban Pakaian Olahraga	380.318.840,00	171.107.500,00
35	Beban Pakaian Paskibraka	391.129.500,00	177.353.335,00
36	Beban Pakaian Jas/Safari	49.000.000,00	56.689.400,00
37	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.380.059.999,00	0,00
TOTAL		79.542.873.775,00	115.820.622.720,00

Dijelaskan bahwa penyajian beban persediaan secara aplikasi sebagaimana pada tabel 5.94 diatas, sudah termasuk makan minum dan pakaian dinas. Namun menurut Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sisten Akuntansi Berbasis Akrua, bahwa yang termasuk beban persediaan adalah Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan Obat-Obatan/Alkon.

5.5.5.3. Beban Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
61.628.421.105,00	107.104.966.362,58

Beban Jasa selama TA.2024 sebesar Rp61.628.421.105,00. Rincian Beban Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 99. Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	43.711.081.353,00	49.719.426.293,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.048.544.175,00	5.412.275.660,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	993.010.620,00	2.669.963.100,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.793.395.900,00	933.185.000,00
5	Beban Jasa Konsultasi Kontruksi	5.427.698.057,00	1.658.353.420,18
6	Beban Jasa Konsultasi Non Kontruksi	0,00	209.235.000,00
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	654.691.000,00	1.259.583.154,00
8	Beban Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	0,00	1.242.602.000,00
9	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	0,00	902.115.000,00
10	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	43.098.227.735,40
Jumlah		61.628.421.105,00	107.104.966.362,58

5.5.5.4. Beban Pemeliharaan	Tahun 2024	Tahun 2023 (Rp)
	(Rp)	
	<u>15.027.943.285,00</u>	<u>7.353.095.820,00</u>

Beban Pemeliharaan selama TA.2024 sebesar Rp15.027.943.285,00. Rincian Beban Pemeliharaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 100. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 20234 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.701.048.056,00	5.543.872.599,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.326.895.229,00	580.892.490,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	848.081.050,00
4	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas	0,00	380.249.681,00
Jumlah		15.027.943.285,00	7.353.095.820,00

5.5.5.5. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>64.528.314.323,00</u>	<u>83.377.257.627,00</u>

Beban Perjalanan Dinas selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.528.314.323,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 101. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.431.280.265,00	10.179.688.833,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.965.310.058,00	73.197.568.794,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	131.724.000,00	0,00
Jumlah		64.528.314.323,00	83.377.257.627,00

5.5.5.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>2.579.538.532,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/Masyarakat TA. 2024 Rp2.579.538.532,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 102. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.392.226.300,00	0,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.187.312.232,00	0,00
JUMLAH		2.579.538.532,00	0,00

5.5.5.7. Beban Barang dan Jasa BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>30.864.260.695,80</u>	<u>0,00</u>

Beban Barang dan Jasa BOS TA. 2024 Rp30.864.260.695,80. Beban Barang dan Jasa BOS dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 103. Beban Barang dan Jasa Bos

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOS	30.864.260.695,80	0,00
JUMLAH		30.864.260.695,80	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.5.8. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	Tahun 2024 (Rp) <hr/> 35.834.003.758,00	Tahun 2023 (Rp) <hr/> 0,00
---	--	---

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.834.003.758,00. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 104. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	35.834.003.758,00	0,00
	JUMLAH	35.834.003.758,00	0,00

5.5.5.9. Beban Subsidi	Tahun 2024 (Rp) <hr/> 829.895.000,00	Tahun 2023 (Rp) <hr/> 1.747.060.000,00
-------------------------------	---	---

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau lokasi anggaran yang diberikan Pemerintah daerah kepada perusahaan untuk jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi merupakan belanja untuk subsidi angkutan laut sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Belanja Subsidi Angkutan Laut, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. RIUS TONE FAST Nomor 500.11/19050/BUP-NS/2023 dan Nomor 29/PT.RTF/X/2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Umum di bidang Transportasi Laut Rute Teluk Dalam - Pulau Tello - Hibala (Pergi Pulang) Tahun Anggaran 2023, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dengan PT. Rius Tone Fast Nomor: 500.11.8.6/01/DISHUB/2024 dan Nomor 01/PT.RTF/X/2024 tentang Pemberian Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan antara Teluk Dalam - Pulau Tello (Pergi Pulang) TA.2024. Realisasi beban Subsidi selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp829.895.000,00. Rincian beban Subsidi sebagai berikut:

Tabel 5. 105. Beban Subsidi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Subsidi BUMN	375.775.000,00	(629.700.000,00)
2	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	454.120.000,00	2.376.760.000,00
	Jumlah	829.895.000,00	1.747.060.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.5.10. Beban Hibah	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>80.531.001.740,00</u>	<u>9.472.965.900,00</u>

Beban Hibah merupakan belanja hibah kepada instansi vertikal, badan/ lembaga/organisasi kemasyarakatan/swasta. Beban hibah ini juga termasuk Beban Beasiswa Pendidikan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah oleh masing-masing lembaga/organisasi dan sebagai dinas teknis pengawasan beasiswa ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Realisasi beban hibah - LO selama TA.2024 sebesar Rp80.531.001.740,00. Rincian beban hibah sebagai berikut.

Tabel 5.106. Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73.909.659.815,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	4.817.500.000,00	7.748.000.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	45.000.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	254.726.000,00	380.000.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.319.172.120,00	1.299.965.900,00
6	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	229.943.805,00	0,00
Jumlah		80.531.001.740,00	9.472.965.900,00

5.5.5.11. Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>4.540.013.000,00</u>	<u>10.445.137.562,00</u>

Beban Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada perorangan atau kelompok organisasi masyarakat. Beban bantuan sosial ini juga termasuk Beban Beasiswa Pendidikan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Lainnya dan sebagai dinas teknis pengawasan beasiswa ini adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan telah diatur dalam bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Selatan telah diatur dalam Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/350/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besar Nominal Belanja Hibah, Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/805/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nias selatan Nomor 100.3.3.2/350/2024 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Nominal Belanja Hibah di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024. Beban bantuan sosial selama TA. 2024 sebesar Rp4.540.013.000,00. Rincian realisasi beban bantuan sosial diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 107. Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya)	4.540.013.000,00	10.445.137.562,00
Jumlah		4.540.013.000,00	10.445.137.562,00

5.5.5.12. Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>1.739.828.715,90</u>	<u>863.831.289,65</u>

Beban Penyisihan piutang merupakan beban penyisihan piutang pajak dan penyisihan transfer pusat Kabupaten Nias Selatan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Beban penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.739.828.715,90.

5.5.5.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>108.904.145.895,73</u>	<u>122.367.665.278,61</u>

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban yang ditanggung oleh aset tetap akibat nilai manfaat dan ekonomis dari aset tersebut semakin berkurang dibanding dengan nilai perolehannya. Pengaturan penyusutan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor:100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Beban Penyusutan periode sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp108.910.705.158,73. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 108. Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	44.502.631.446,63	44.468.447.798,41
2	Gedung dan Bangunan	22.931.236.015,00	21.397.378.233,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.262.922.330,10	56.349.083.195,20
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	31.080.000,00
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	193.302.640,00	121.676.052,00
6	Beban Penyusutan Properti Investasi	14.053.464,00	0,00
Jumlah		108.904.145.895,73	122.367.665.278,61

5.5.5.14 Beban Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>70.854.062.940,00</u>	<u>66.531.047.347,00</u>

Beban Transfer merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Desa. Jumlah Desa penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2024 sebanyak 459 Desa dari 35 Kecamatan. Realisasi Beban Transfer bantuan keuangan ke Desa selama TA.2024 sebesar Rp70.854.062.940,00

Tabel 5. 109. Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	70.854.062.940,00	66.531.047.347,00
Jumlah		70.854.062.940,00	66.531.047.347,00

5.5.5.15 Beban Tidak Terduga	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.954.521.800,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Tidak Terduga - LO Tahun 2024 sebesar Rp1.954.521.800,00.

5.5.5.16 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional – LO	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO merupakan Defisit Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

5.5.6 Surplus / Defisit- LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<u>148.615.183.796,89</u>	<u>234.084.489.870,37</u>

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp148.615.183.796,89.

5.6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (*cashflow statement*) bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Periode pelaporan arus kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk TA.2024 yaitu 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan. Pengklasifikasian arus kas terdiri dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2024 berasal dari :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.552.128.805.972,14	1.543.327.013.979,97
Arus Keluar Kas	1.300.135.524.942,80	1.193.032.115.257,40
Arus Kas Bersih	251.993.281.029,34	350.294.898.722,57

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.552.128.805.972,14. Dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 110. Arus Masuk Kas Arus dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	14.023.775.776,15	14.020.315.098,45
2	Penerimaan Retribusi Daerah	284.552.800,00	197.686.288,00
3	Penerimaan HPKD yang dipisahkan	6.066.435.843,00	4.815.589.663,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	10.408.998.449,19	18.960.201.319,52
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.472.502.516.093,80	1.455.632.175.515,00
6	Pendapatan Antar Daerah	35.100.826.725,00	49.701.046.096,00
7	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.741.700.285	0,00
Jumlah		1.552.128.805.972,14	1.543.327.013.979,97

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.300.135.524.942,80 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 111. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	455.727.333.392,00	388.144.685.284,00
2	Belanja Barang dan Jasa	283.895.556.571,80	318.153.245.144,40
3	Belanja Subsidi	829.895.000,00	2.376.760.000,00
4	Belanja Hibah	80.531.001.740,00	9.472.965.900,00
5	Belanja Bantuan Sosial	4.540.013.000	10.445.137.562,00
6	Belanja Tidak Terduga	1954521800,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	472.657.203.439,00	464.439.321.367,00
Jumlah		1.300.135.524.942,80	1.193.032.115.257,40

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi per 31 Desember 2024 berasal dari :

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	(297.305.992.715,25)	248.448.650.092,00
Arus Kas Bersih	(297.305.992.715,25)	(248.448.650.092,00)

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp297.305.992.715,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 112. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.014.782.514,33	70.351.730.324,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	153.659.718.980,92	61.778.235.064,00
4	Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan	114.104.855.370,00	109.613.079.303,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.526.635.850,00	2.185.605.401,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	20.000.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00
Jumlah		297.305.992.715,25	248.448.650.092,00

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan per 31 Desember 2024 berasal dari:

Tabel 5. 113. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 berasal dari:



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 5. 114. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Masuk	77.021.087.867,55	74.049.125.169,00
Arus Kas Keluar	77.021.087.867,55	74.635.992.240,00
Arus Kas Bersih	0,00	(586.867.071,00)

a. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp77.021.087.867,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan PFK	77.021.087.867,55	74.049.125.169,00
Jumlah		77.021.087.867,55	74.049.125.169,00

b. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp77.021.087.867,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 116. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pengeluaran PFK	77.021.087.867,55	74.635.992.240,00
Jumlah		77.021.087.867,55	74.635.992.240,00

5.6.5. Saldo Awal Kas

Saldo Awal kas per 1 Januari 2024 yaitu Saldo Akhir kas di kas daerah Tahun 2023 sebesar Rp174.235.703.640,43, Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00, Kas di Bendahara Pengeluaran Rp216.374,00, Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp380.830.968,20, Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP Tahun 2023 sebesar Rp31.433.160,00, dan Kas Lainnya sebesar Rp448.840.358,00.

5.6.6. Saldo Akhir Kas



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.944.708.277,72 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada akhir TA.2024 yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Saldo akhir kas diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 117. Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	128.656.586.537,52	174.235.703.640,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	216.374,00
3	Kas Dana BOS	179.618.034,20	380.830.968,20
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1,00	31.433.160,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	948.108.242,00	0,00
6	Kas Lainnya	160.395.463,00	448.840.358,00
Saldo Akhir Kas		129.944.708.277,72	175.097.024.500,63



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Jalan Arah Lagundri KM.5 Kecamatan Fanayama. Kabupaten Nias Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, yang telah disahkan menjadi daerah otonom dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-Pak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Medan pada tanggal 28 Juli 2003.

Sifat operasi yang diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bukan berorientasi mencari untung (*profit oriented*), melainkan mengedepankan implementasi pelayanan yang bersifat administratif operasional pemerintahan, melakukan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, kegiatan pokoknya adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan membentuk Perangkat Daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran satuan kerja sebelumnya pada tanggal 16 November tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan tanggal 27 November 2024 telah dilakukan pemilihan umum kepala daerah yang baru dan saat ini Kabupaten Nias Selatan dipimpin oleh **SOKHIATULO LAIA**, sebagai Bupati Nias Selatan dan **Ir. YUSUF NACHE, S.T., M.M.** sebagai Wakil Bupati Nias Selatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil pada Kabupaten dan Kota hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Wakil masyarakat terpilih sebanyak 35 orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang diketuai oleh **Elisati Halawa, S.T.**

Kabupaten Nias Selatan berada di bagian barat Sumatera Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat, sebelah timur



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebelah selatan dengan Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 1.825,2 km² dan wilayah terdiri dari 104 buah pulau, 35 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 459 Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2024, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi kemudian entitas pelaporan melakukan penggabungan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya dilakukan melalui proses akuntansi, baik secara manual maupun melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/53/2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Semoga laporan keuangan ini dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada pengguna laporan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Nias Selatan.


BUPATI NIAS SELATAN,

SOKHIATULO LAIA